



# LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN 2022  
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE  
KELAS IA**

 : PN Ternate

 : pn\_ternate

 : ptsppnternate@gmail.com

## KATA PENGANTAR

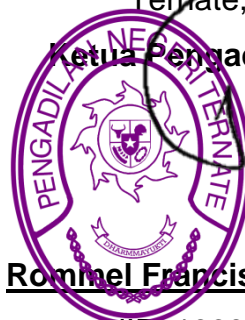
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kita masih tetap diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih tetap bekerja dan berkarya demi kemajuan Bangsa Indonesia dalam meningkatkan supermasi hukum, dan atas izin dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan.

Inti dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA Tahun 2022 ini berisi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Ternate dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun sebagai upaya evaluasi sistem peradilan yang lebih baik dan mengarah pada peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, bersih, cepat, biaya ringan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA Tahun 2022 masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan petunjuk sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi kami.

Ternate, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Ternate



**Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**

NIP. 196904241996031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI TERNATE.....</b>	<b>12</b>
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	12
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	12
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	29
3. Perkara Prodeo .....	31
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>33</b>
A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan.....	33
1. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Jabatan.....	36
2. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Pendidikan.....	38
3. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Golongan/ Ruang .....	39
B. Mutasi .....	40
1. Mutasi Keluar .....	40
2. Mutasi Masuk .....	40
C. Promosi .....	40
D. Pensiun.....	42
E. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) .....	42
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>43</b>
A. Pengelolaan Keuangan .....	43
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	44
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	49
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>52</b>

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	52
B. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).....	55
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	55
D. Inovasi Pelayanan Publik.....	58
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Internal.....	64
B. Evaluasi .....	66
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Rekomendasi.....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. SEJARAH PENGADILAN

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A adalah Pengadilan yang terletak di Kota Ternate yang saat ini menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A sebenarnya sudah ada sebelum perang dunia ke-2 pada jaman penjajahan bangsa Belanda, hanya dikenal satu Pengadilan. Pengadilan ini dalam fungsinya mengadili dan memutuskan perkara dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Residentie Gerahit : Untuk mengadili orang
2. Landraad : Untuk Mengadili orang-orang bumi putra yang bertempat tinggal pada batas tanah government
3. Hijkaraat : Untuk Mengadili orang-orang kesultanan yang bertempat tinggal di batas tanah swapraja

Sesudah kedaulatan, yaitu pada Tahun 1951 barulah Pengadilan ini dirubah menjadi Pengadilan Negeri Ternate, pada saat itu gedung Pengadilan Negeri Ternate masih bergabung dengan Kantor Bupati Maluku Utara, kemudian pada Tahun 1974 barulah dibangun gedung Pengadilan Negeri Ternate yang terletak di Jl. Gelora Kie Raha, Kel. Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sampai dengan saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tertanggal 27 Mei 1957 No.JP.18/71/6 Pengadilan Negeri Ternate ditetapkan sebagai Pengadilan Klas IV, kemudian pada tanggal 11 Juli 1961 dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JP.18/71/13 Pengadilan Negeri Ternate ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas III, kemudian pada tanggal 31 Maret 1964 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal No.JB 1/1/21 Pengadilan Negeri Ternate ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas II A, kemudian sejak tanggal 17 April 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JZP 1/1/4 Pengadilan Negeri Ternate ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II. Kemudian dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Agustus



1977 No.JB1/1/49 Pengadilan Negeri Ternate ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pengadilan Hubungan Industrial Ternate pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam pasal 59 (1) bahwa untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2011 diterbitkan kembali Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A.

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A pada tahun 2020 telah ditingkatkan kelasnya dari Pengadilan Negeri Kelas I B ke Pengadilan Negeri Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Pengadilan Kelas II Menjadi Kelas I B dan Empat Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A.

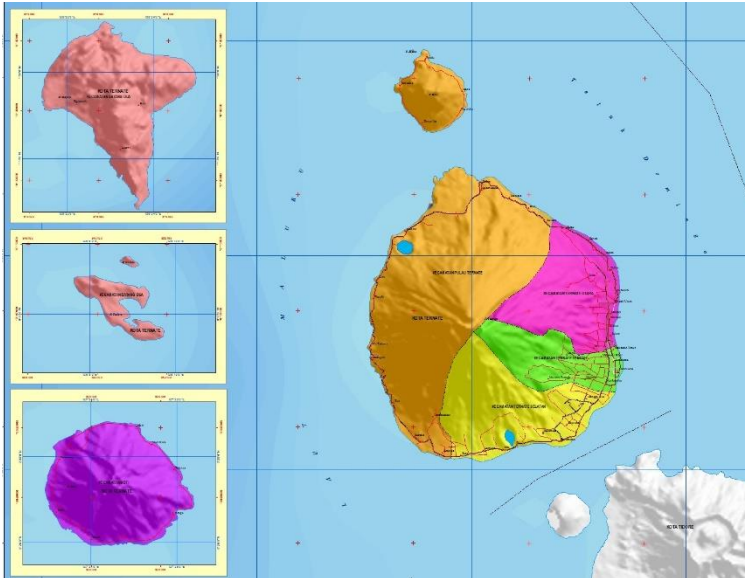
➤ **Letak Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A**

Kantor Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A terletak tepat di pusat kota Ternate, di Jl. Gelora Kie Raha, Kel. Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.



➤ **Wilayah Yuridiksi :**

1. Kota Ternate  
Luas Wilayah : 5.709,58 km<sup>2</sup>



2. Kabupaten Halmahera Barat  
Luas Wilayah : 14.823,16 km<sup>2</sup>



**B. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A sebagai salah satu lembaga Peradilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern”. Untuk itu, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah diuraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A juga berpedoman kepada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas yang antara lain sebagai berikut :



1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.
2. Program sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan pelayanan kejelasan waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.
3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Ternate “www.pn-ternate.go.id” serta menggalakkan dan memantau pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.
4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan dengan mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Ternate.
5. Selain itu, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A telah berkomitmen untuk mensukseskan kepercayaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. VISI DAN MISI**

Visi Pengadilan Negeri Ternate mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

”TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI PENGADILAN NEGERI TERNATE”

Misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ternate
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ternate
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ternate

#### **D. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE KELAS IA**

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
4. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

#### **E. BUDAYA KERJA**

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Ternate;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

## **F. MOTTO**

Moto Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas I A adalah Pelayanan Prima dan Putusan Berkualitas.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI TERNATE

#### A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Rekapitulasi Keadaan Perkara pidana diputus tahun 2022 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan dan Pidana lalu Lintas. Khusus, untuk perkara Pidana Biasa Terdapat sisa 6 perkara dan masih dalam proses persidangan dan rencana akan diputus pada tahun 2023;

Pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah perkara Pidana masuk pada jenis perkara pidana biasa/khusus yaitu dari jumlah 318 perkara pada tahun 2021 menjadi 282 perkara pada tahun 2022. Untuk perkara pidana singkat baik pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat perkara yang masuk. Perkara pidana anak terdapat 12 perkara di tahun 2021 dan 13 perkara di tahun 2022. Perkara lalu lintas mengalami peningkatan dari 6.877 perkara di tahun 2021 menjadi 11.305 perkara tahun 2022. Pada perkara pidana ringan/cepat jumlah perkara naik dari 7 perkara di tahun 2021 menjadi 22 perkara tahun 2022. Untuk perkara praperadilan jumlah perkara mengalami penurunan dari 9 perkara pada tahun 2021 dan menjadi 8 perkara pada tahun 2022.

Sedangkan Rekapitulasi Keadaan Perkara perdata diputus tahun 2021 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana dan Perdata Permohonan. Khusus untuk perkara Perdata Gugatan terdapat sisa 5 perkara tahun 2021 dan telah diputus pada tahun 2022.

Pada tahun 2021 terdapat 82 perkara masuk pada jenis perkara Perdata Gugatan sama dengan jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun 2022 yaitu 82 perkara. Untuk perkara Perdata Gugatan Sederhana mengalami kenaikan yaitu dari 11 perkara pada tahun 2021 menjadi 18 perkara tahun 2022. Untuk Perkara Permohonan mengalami kenaikan dari 122 perkara pada tahun 2021 menjadi 141 perkara Tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya penjelasan mengenai Laporan keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Ternate, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut dibawah ini:

TAHUN		JENIS PERKARA PIDANA						
		BIASA	KHUSUS	ANAK SINGKAT	RINGAN	LALU LINTAS	PRA PERADILAN	
2020	Sisa Awal	87	13	0	0	0	0	
	Masuk	312	16	12	0	34	9.911	5
	Putus	345	26	11	0	34	9.911	5
	Sisa Akhir	54	3	1	0	0	0	0
2021	Sisa Awal	54	3	1	0	0	0	0
	Masuk	291	27	12	0	7	6.877	9
	Putus	313	18	13	0	7	6.877	9
	Sisa Akhir	32	12	0	0	0	0	0
2022	Sisa Awal	32	12	0	0	0	0	0
	Masuk	236	46	13	0	22	11.305	8
	Putus	235	41	13	0	22	11.305	8
	Sisa Akhir	33	17	0	0	0	0	0

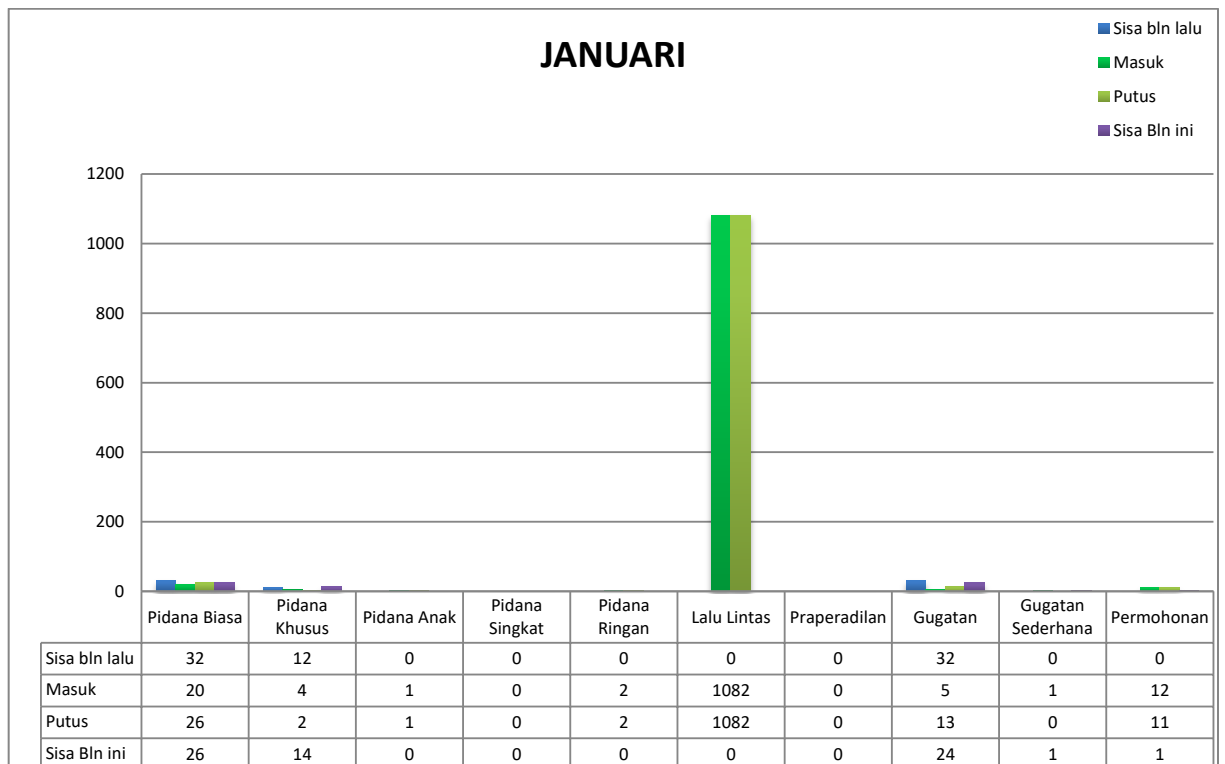
Tabel Rekapitulasi perkara pidana dari tahun 2020 s.d. 2022

TAHUN		JENIS PERKARA PERDATA		
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2020	SISA AWAL	13	0	3
	MASUK	69	17	84
	PUTUS	61	16	86
	SISA 2019	21	1	1
2021	SISA AWAL	21	1	1
	MASUK	82	11	122
	PUTUS	72	12	123
	SISA 2020	31	0	0
2022	SISA AWAL	31	0	0
	MASUK	82	18	141
	PUTUS	94	18	139
	SISA 2021	20	0	2

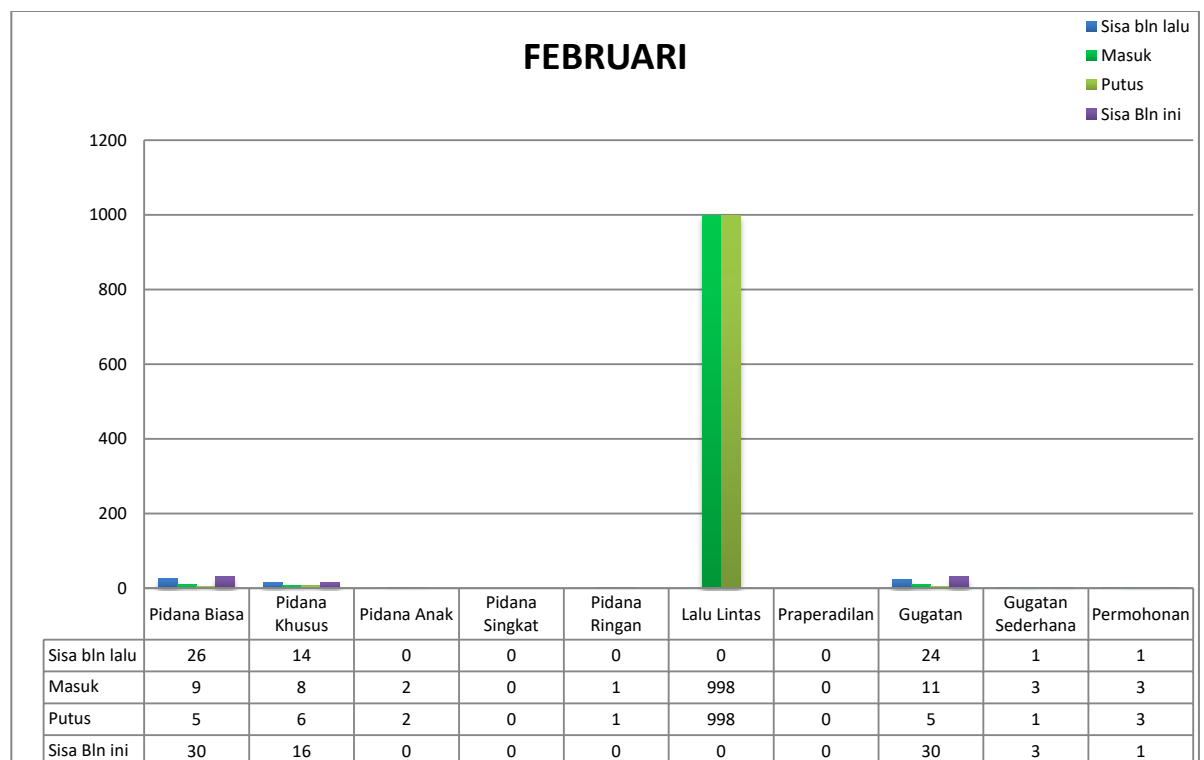


*Tabel Rekapitulasi perkara perdata dari tahun 2020 s.d. 2022*

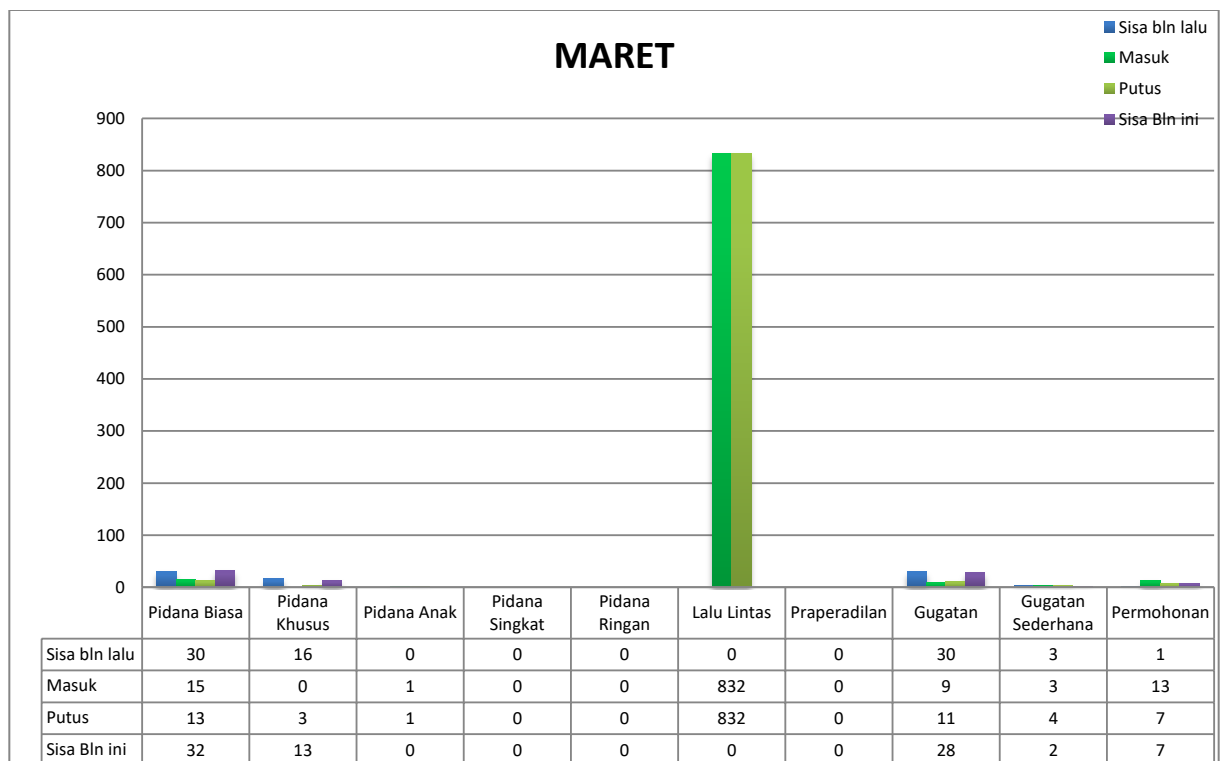
Detail data per bulan keadaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Ternate dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2022 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



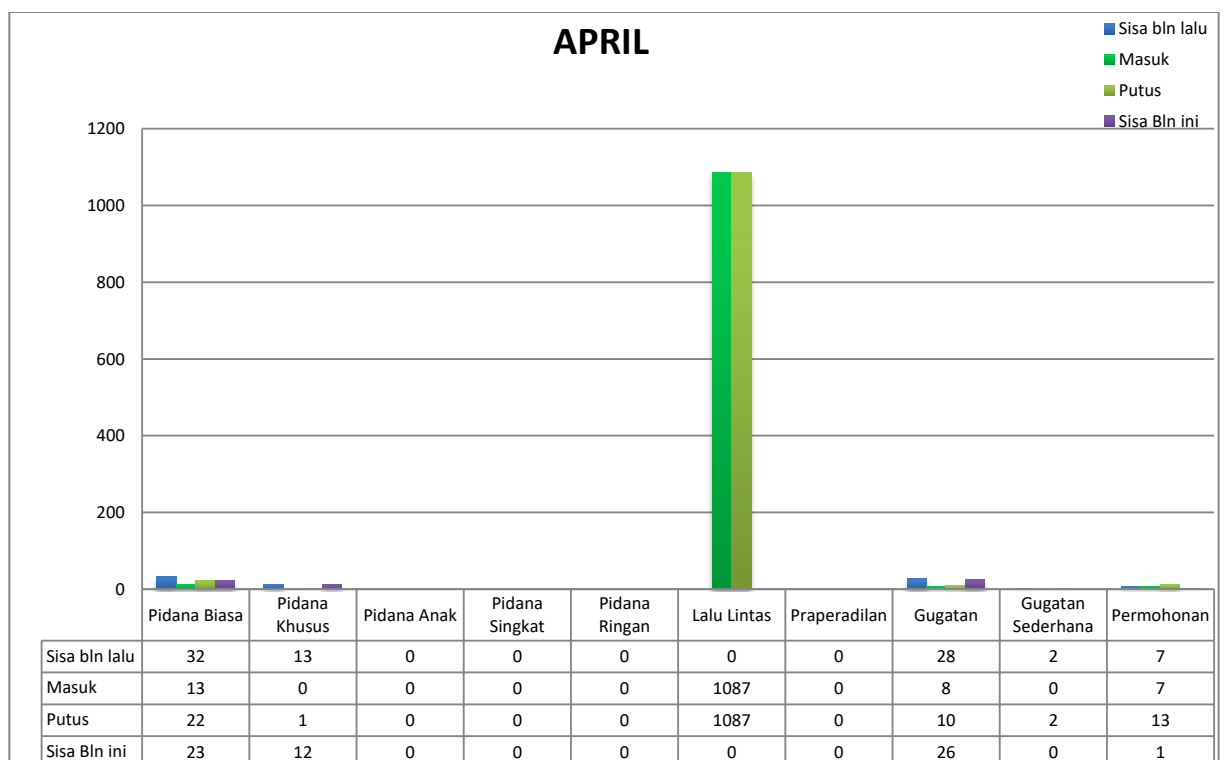
*Grafik keadaan perkara bulan Januari 2022*



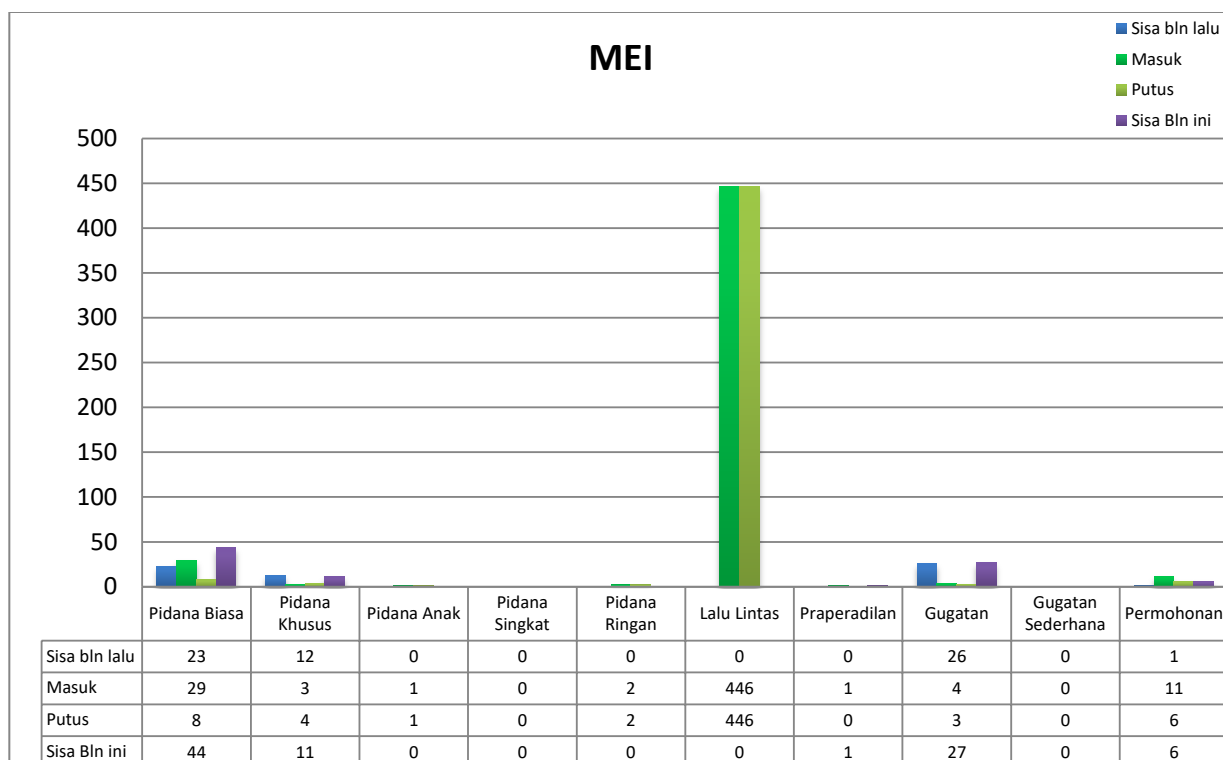
*Grafik keadaan perkara bulan Februari 2022*



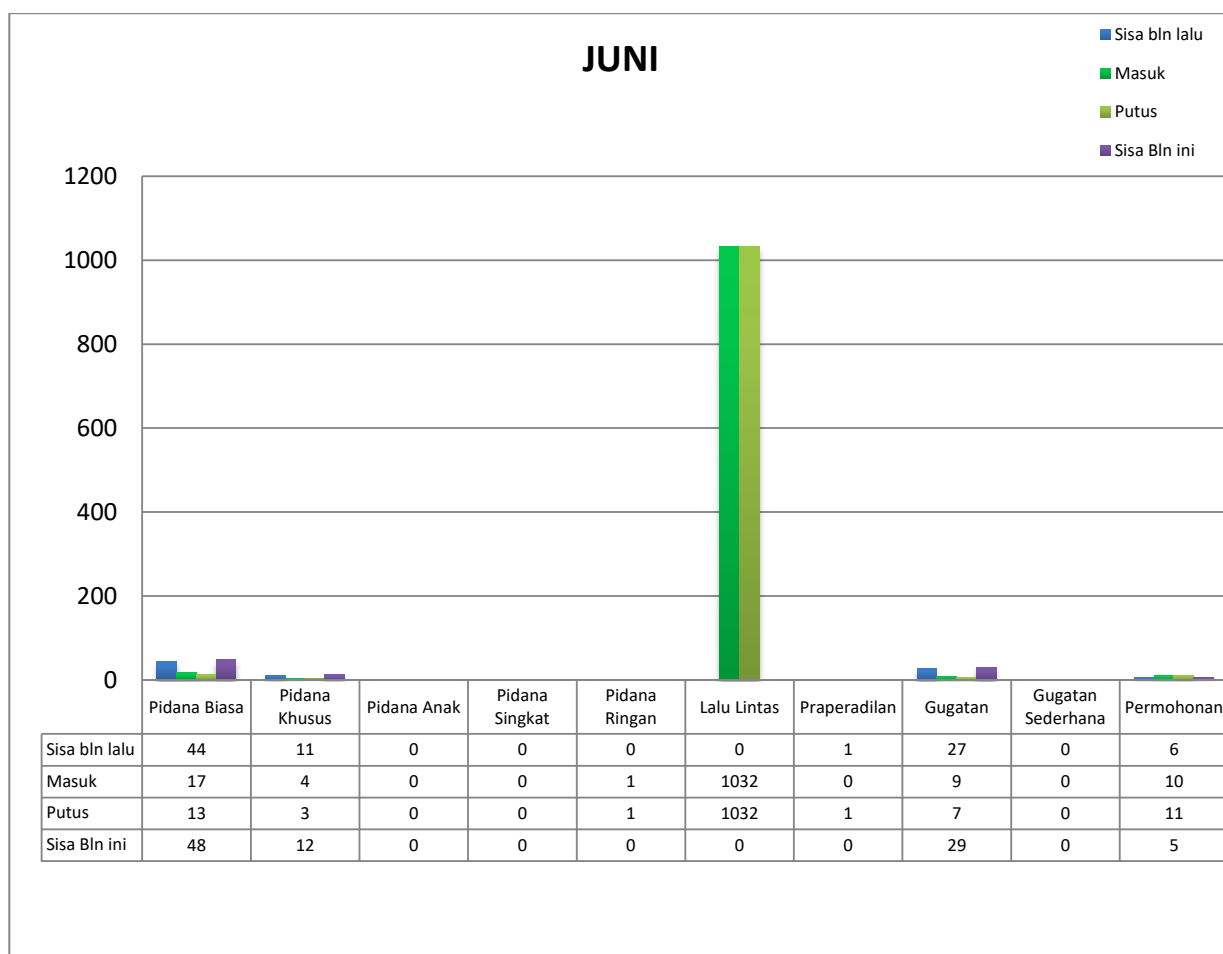
*Grafik keadaan perkara bulan Maret 2022*



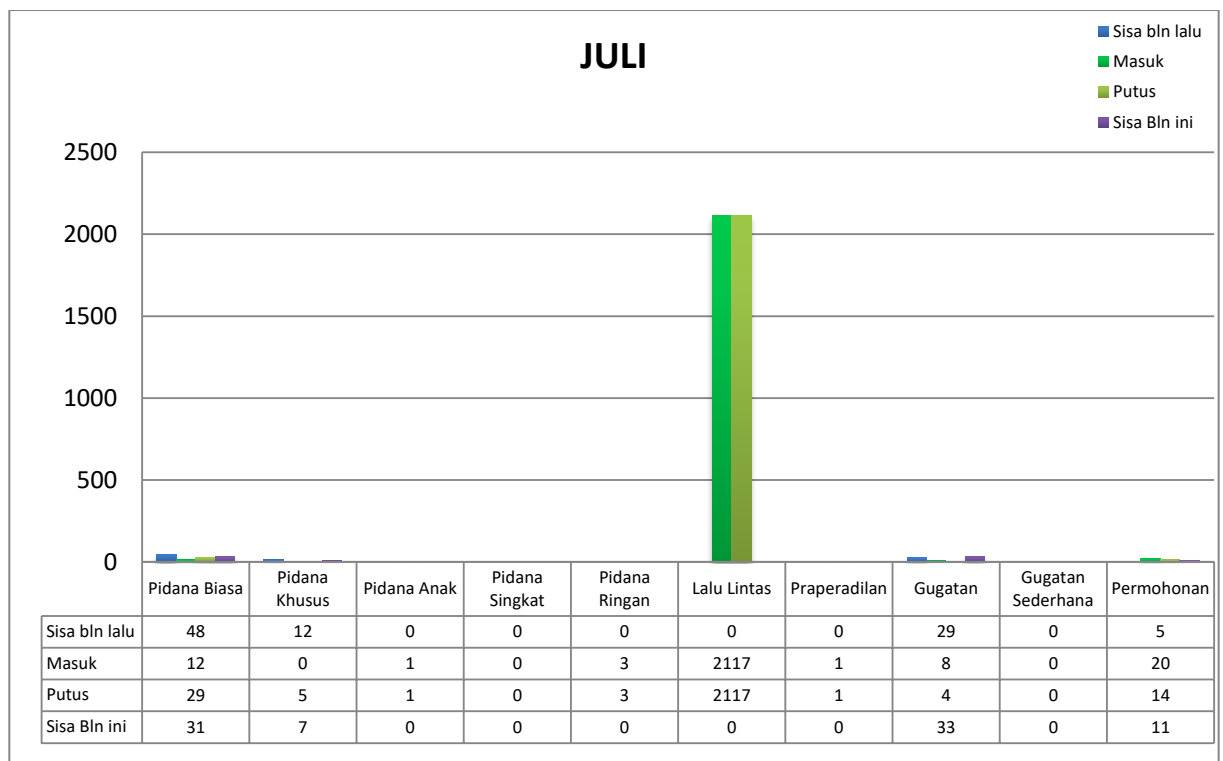
*Grafik keadaan perkara bulan April 2022*



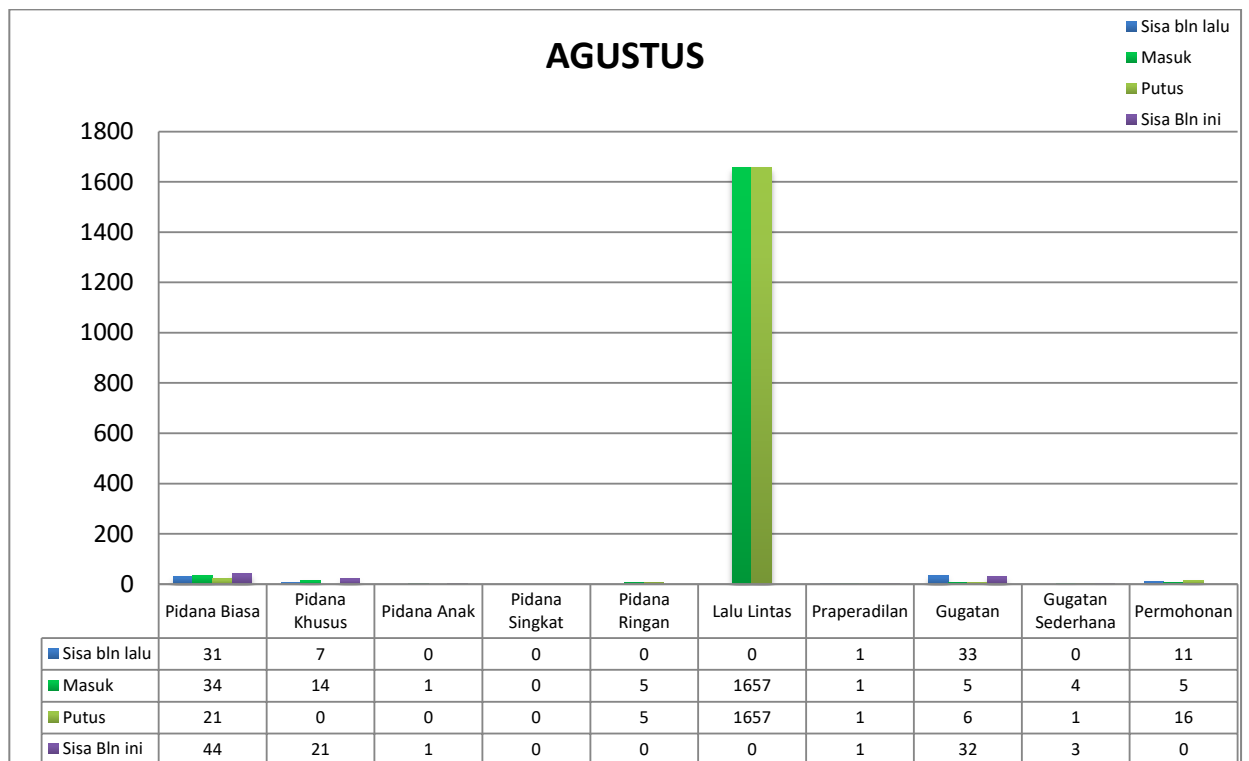
*Grafik keadaan perkara bulan Mei 2022*



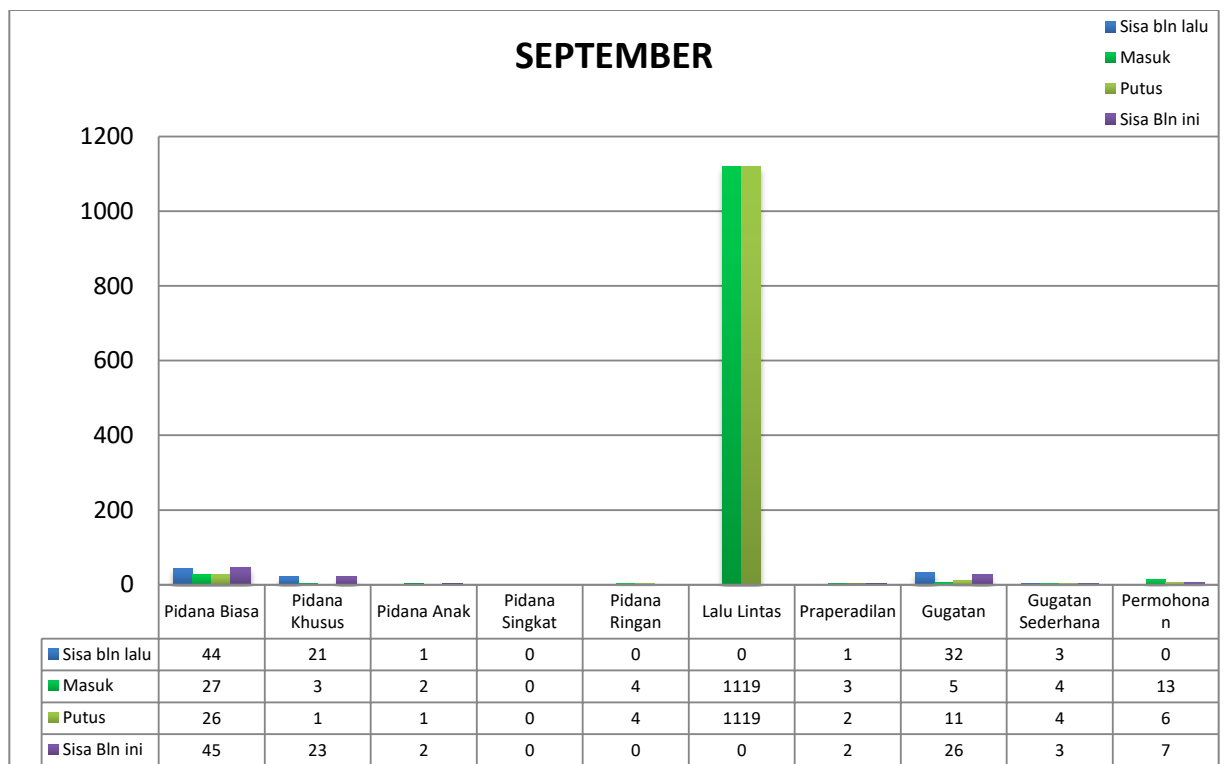
*Grafik keadaan perkara bulan Juni 2022*



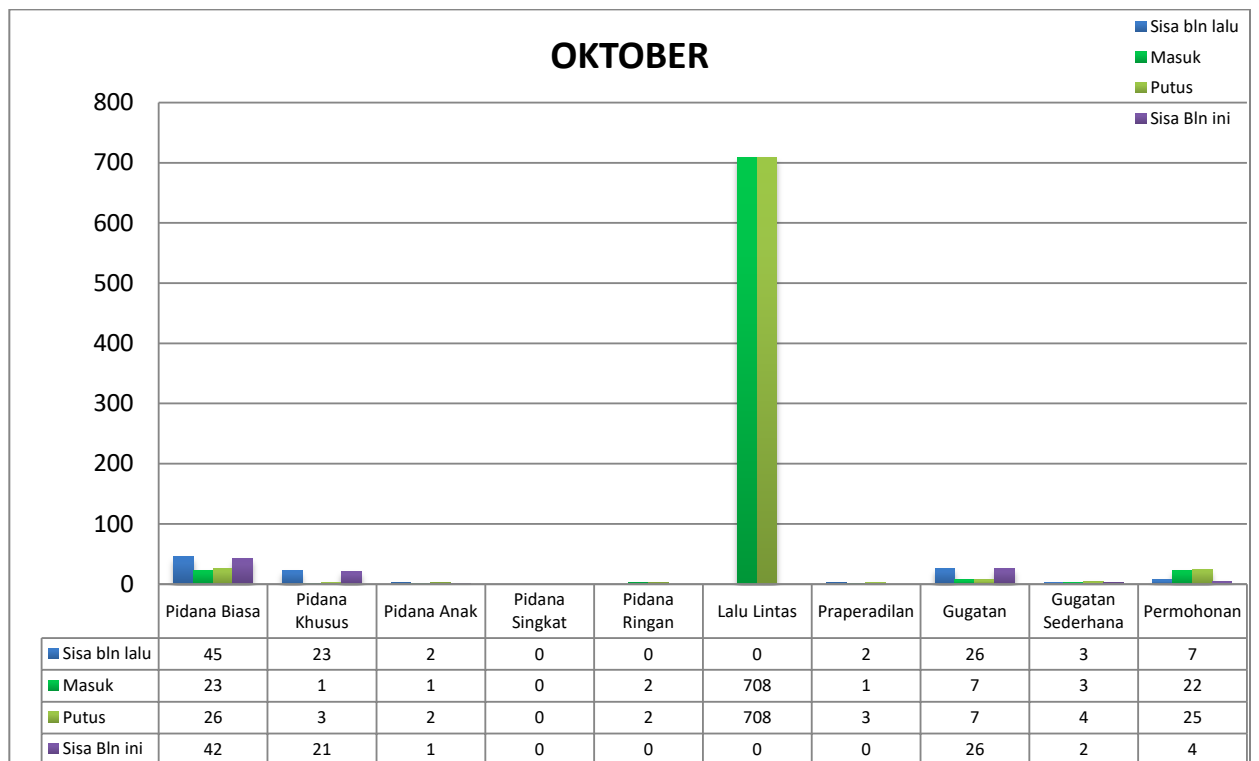
*Grafik keadaan perkara bulan Juli 2022*



*Grafik keadaan perkara bulan Agustus 2022*

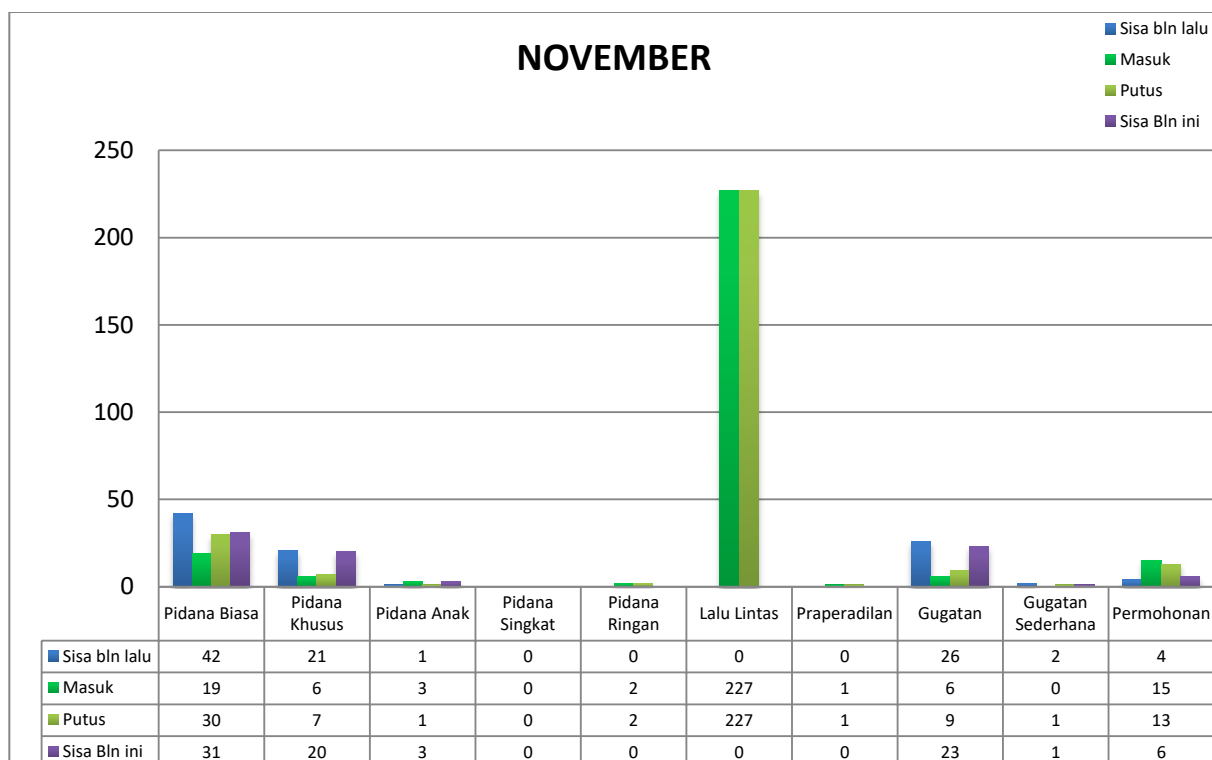


*Grafik keadaan perkara bulan September 2022*

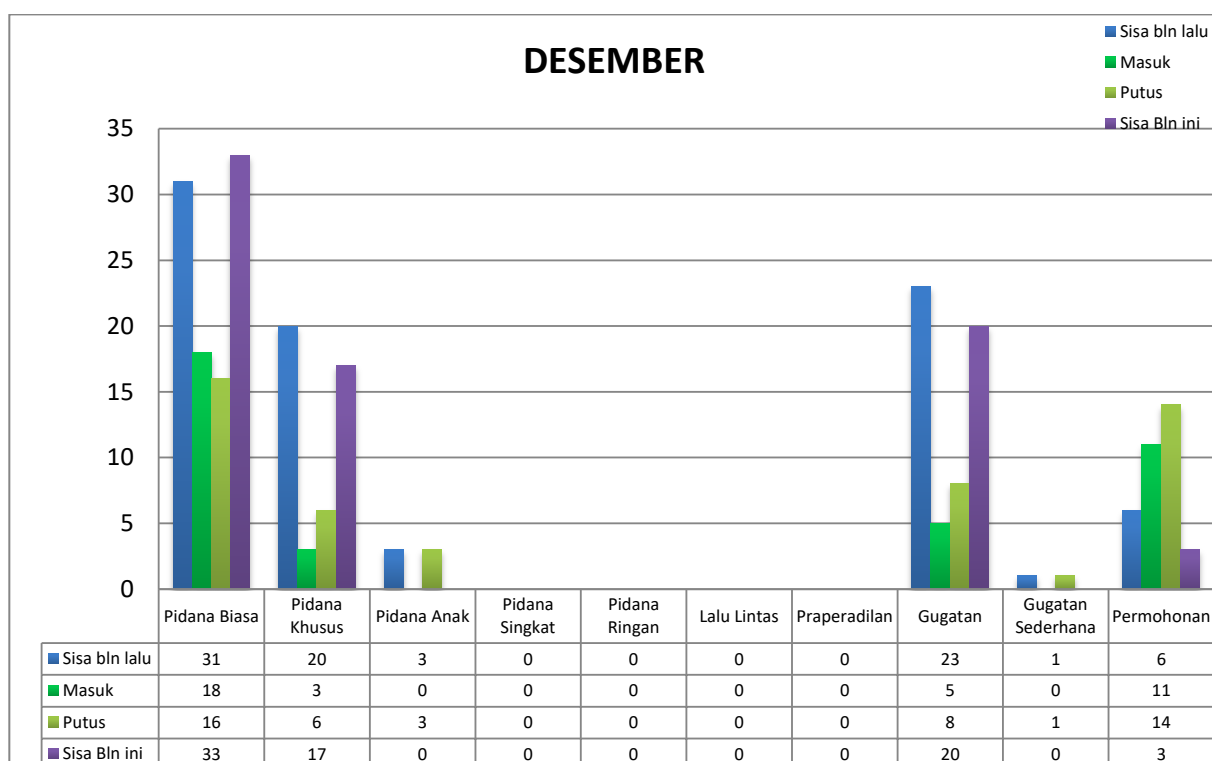


*Grafik keadaan perkara bulan Oktober 2022*





*Grafik keadaan perkara bulan November 2022*



*Grafik keadaan perkara bulan Desember 2022*

Mengenai Pengelolaan dan Pengawasan terhadap Keuangan Pihak Ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pihak Ketiga Kepaniteraan Perdata, maka akan Kami sampaikan Keadaan Keuangan Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Tabel sebagaimana dibawah ini:

Tahun	Keadaan Keuangan Pihak Ketiga
Sisa Tahun 2021	Rp. 77.669.420,-
Penerima Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Rp. 490.253.500,-
Jumlah pengeluaran Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Rp. 488.401.181,-
Saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Rp. 79.521.739,-

*Tabel Keadaan Keuangan Pihak Ketiga Januari 2022 s.d Desember 2022*

### 1. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Untuk perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dijelaskan bahwa Perkara yang dimohonkan banding mengalami kenaikan dari 13 perkara pada tahun 2021 menjadi 42 perkara tahun 2022.

TAHUN	UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA	
2020	Sisa Awal	3
	Masuk	31
	Putus	29
	Sisa Akhir 2020	5
2021	Sisa Awal	5
	Masuk	13
	Putus	16
	Sisa Akhir 2021	2
2022	Sisa Awal	2
	Masuk	42
	Putus	32
	Sisa Akhir 2022	12

*Tabel Rekapitulasi Banding Perkara pidana dari tahun 2020 s.d. 2022*

Sedangkan untuk perkara Perdata yang dimohonkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan Banding dari tahun 2020 s.d. 2022 sebagai berikut :

TAHUN		UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA
2020	SISA AWAL	3
	MASUK	17
	PUTUS	16
	SISA AKHIR 2020	3
2021	SISA AWAL	3
	MASUK	14
	PUTUS	16
	SISA AKHIR 2021	1
2022	SISA AWAL	1
	MASUK	23
	PUTUS	15
	SISA AKHIR 2022	9

*Tabel Rekapitulasi Banding Perdata dari tahun 2020 s.d. 2022*

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Untuk perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dapat dijelaskan bahwa Perkara yang dimohonkan kasasi mengalami kenaikan dari 12 perkara pada tahun 2021 menjadi 24 perkara tahun 2022.

TAHUN		UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA
2020	Sisa Awal	9
	Masuk	13
	Putus	11
	Sisa Akhir 2020	11
2021	Sisa Awal	11
	Masuk	12
	Putus	8
	Sisa Akhir 2021	15
2022	Sisa Awal	15
	Masuk	24
	Putus	13
	Sisa Akhir 2022	26

*Tabel Rekapitulasi Kasasi Perkara pidana dari tahun 2020 s.d. 2022*

Sedangkan untuk perkara Perdata yang dimohonkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada Tabel rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan Kasasi dari tahun 2020 s.d. 2022 sebagai berikut :

TAHUN		UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PERDATA
2020	SISA AWAL	28
	MASUK	20
	PUTUS	13
	SISA AKHIR 2020	35
2021	SISA AWAL	35
	MASUK	18
	PUTUS	13
	SISA AKHIR 2021	40
2022	SISA AWAL	40
	MASUK	18
	PUTUS	20
	SISA AKHIR 2022	38

*Tabel Rekapitulasi Banding Perdata dari tahun 2020 s.d. 2022*

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, tidak ada Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Ternate, baik itu Perkara Pidana maupun perkara Perdata.

#### A. Penyelesaian Perkara

##### 1. Jumlah sisa Perkara yang diputus

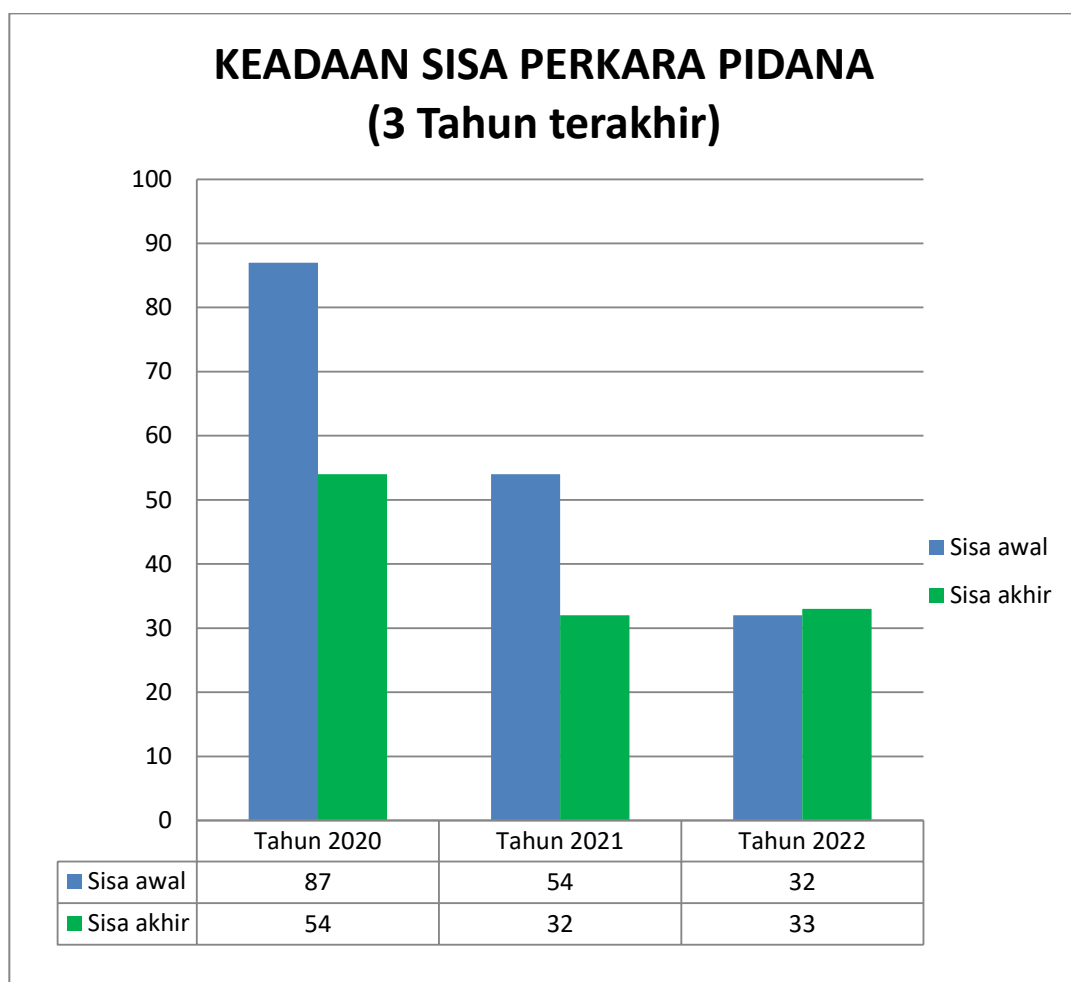
Data berikut ini menyajikan perkembangan sisa perkara pada setiap akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir, Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi jumlah sisa perkara setiap tahun, yaitu dengan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara.

##### a) Perkara Pidana

PERKARA	2020	2021	2022
Sisa awal tahun	87	54	32
Perkara masuk	312	291	236
Beban perkara	<b>399</b>	<b>345</b>	<b>268</b>
Perkara putus	345	313	235
Sisa perkara	54	32	33

*Tabel Penyelesaian Perkara Pidana*

Sedangkan untuk melihat Grafik Penyelesaian perkara pidana pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA tersaji pada Grafik dibawah ini:



*Grafik Keadaan sisa perkara pidana 3 tahun terakhir*

**Persentase Penyelesaian**

Persentase	2020	2021	2022
Persentase Sisa Perkara Terhadap Beban Perkara	13,53%	9,27%	12,31%
Persentase Perkara Putus Terhadap Beban Perkara	86,47%	90,73%	87,69%

*Tabel Persentase Penyelesaian Perkara Pidana*

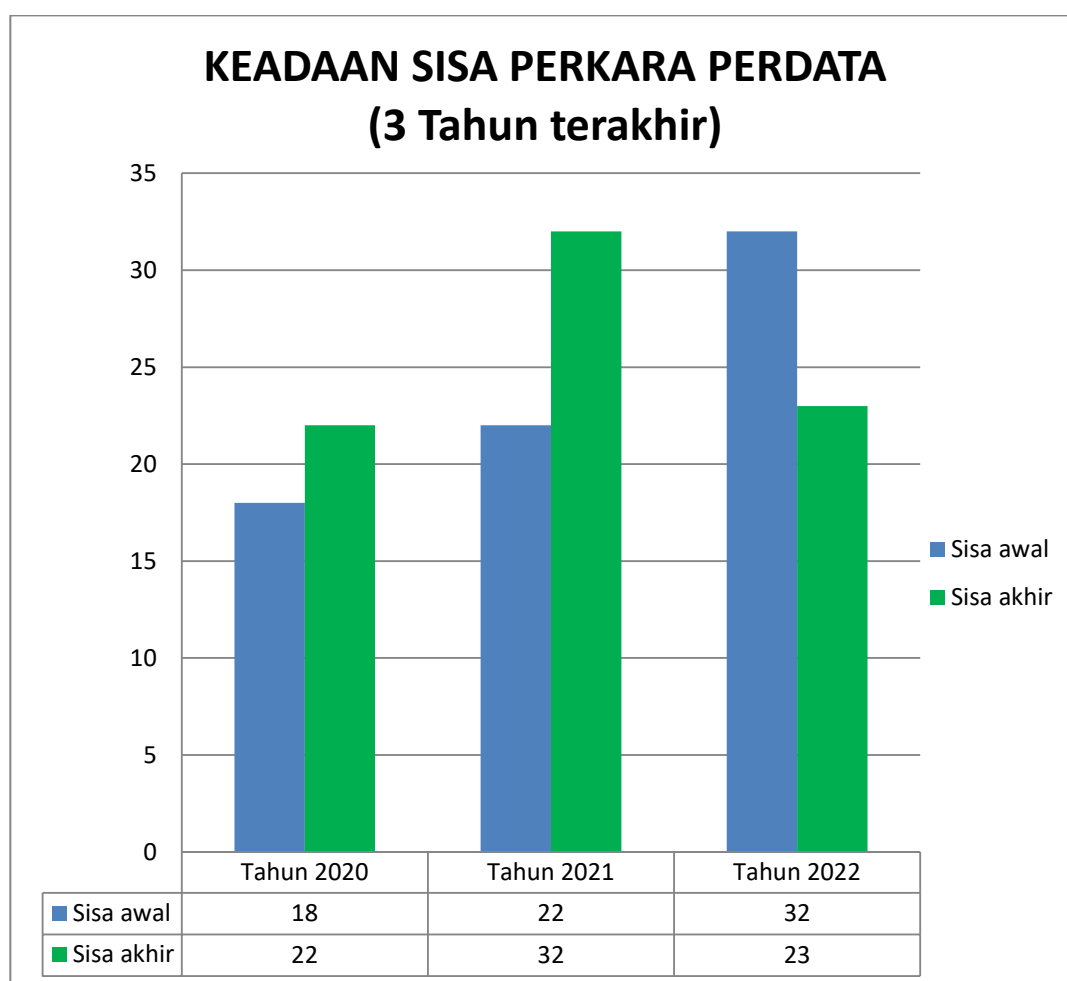
**b) Perkara Perdata**

PERKARA	2020	2021	2022
Sisa awal tahun	18	22	32
Perkara masuk	156	207	224
Beban perkara	174	229	256
Perkara putus	152	197	233
Sisa perkara	22	32	23

*Tabel Penyelesaian Perkara Perdata*



Sedangkan untuk melihat Grafik Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA tersaji pada Grafik dibawah ini:



*Grafik Keadaan sisa perkara perdata 3 tahun terakhir*

#### Persentase Penyelesaian

Persentase	2020	2021	2022
Persentase Sisa Perkara Terhadap Beban Perkara	12,64%	13,97%	8,98%
Persentase Perkara Putus Terhadap Beban Perkara	87,36%	86,03%	91,02%

*Tabel Persentase Penyelesaian Perkara Perdata*

## 2. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menekankan bahwa Batas Waktu Maksimal Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata untuk Tingkat Pertama adalah 5 (lima) Bulan. Penyelesaian perkara yang dimaksud disini adalah pengadministrasian perkara dari pendaftaran hingga selesai minutasi.

Pengadilan Negeri Ternate selama Tahun 2022 selalu melakukan penyelesaian perkara, baik itu Perkara Pidana maupun Perkara Perdata

dengan jangka waktu di bawah 5 (lima) Bulan, sehingga dapat disimpulkan Jumlah Perkara Pidana maupun Perdata yang diputus tepat waktu dipersentasekan sebesar 100%.

### 3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Ada anggapan bahwa indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Menurut anggapan tersebut jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung yang dapat menghasilkan putusan yang membawa keadilan.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perbandingan antara upaya hukum di Pengadilan Negeri Ternate dengan beban perkara selama tahun 2022.

#### a) Pidana

Upaya Hukum	Perkara Putus	Jumlah					
		Sisa Thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Cabut	Sisa Thn 2022
Banding		2	42	44	32	0	12
Kasasi		15	24	39	13	0	26
PK		2	0	2	0	0	2
Grasi		0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	45						

Tabel Penyelesaian Upaya Hukum Pidana

#### Persentase Upaya Hukum Pidana

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan adalah dengan membandingkan antara jumlah beban upaya hukum dengan jumlah perkara yang putus pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Grafik dibawah ini.

Persentase	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Persentase Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	8.72%	6.59%	0,85 %	0%
Persentase Perkara yang tidak	<b>91.28%</b>	<b>93.41%</b>	<b>99.15</b>	<b>100%</b>

mengajukan Upaya hukum	%
------------------------	---

Tabel Persentase Penyelesaian Upaya Hukum Pidana

**b) Perdata**

Upaya Hukum	Perkara Putus	Jumlah					Sisa Thn 2022
		Sisa thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Cabut	
Banding		2	21	23	14	0	9
Kasasi		24	9	33	13	0	20
PK		1	2	3	0	0	3
<b>Jumlah</b>	27						

Tabel Penyelesaian Upaya Hukum Perdata

**Persentase Upaya Hukum Perdata**

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan adalah dengan membandingkan antara jumlah beban upaya hukum dengan jumlah perkara yang putus pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Grafik dibawah ini.

Persentase	Banding	Kasasi	PK
Persentase Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	9.01%	3.86%	0.85%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum	90.99%	96.14%	99.15%

Tabel Persentase Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata

**4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil dimediasi**

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memaakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah kebijakan Mahkamah agung dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama, berikut akan Kami sampaikan Penyelesaian Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ternate Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah.

No.	Perkara Mediasi	Penyelesaian Mediasi				
		Berhasil				Tidak Berhasil
		Berhasil seluruhnya	Berhasil sebagian	Penetapan pencabutan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	46	3	0	0	3	38

Perkara yang diMediasi : 46 Perkara

Mediasi Berhasil : 3 Perkara  
 Mediasi Gagal : 38 Perkara  
 Masih berjalan : 4 Perkara  
 Mediasi tidak dapat dilaksanakan : 1 perkara

Untuk mengetahui persentase keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Ternate, maka diperoleh rumus jumlah Mediasi Berhasil dibagi Jumlah Keseluruhan Perkara Mediasi dikali 100%. sehingga memperoleh hasil **6.52 %**

### 5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Pada tahun 2022 ini tidak terdapat perkara anak yang dilanjutkan dengan diversi pada tingkat pengadilan.

No.	Perkara Diversi	Penyelesaian Diversi	
		Berhasil	Tidak Berhasil
1	0	0	0

## B. Akreditasi Penjaminan Mutu (ISO Pengadilan)

### 1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Pos bakum) Pengadilan Negeri Ternate dalam bentuk kerja sama dengan beberapa bantuan Hukum yang ada di wilayah Kota Ternate – Maluku Utara, lembaga lembaga sebelumnya telah diadakan MoU (memorandum of Understanding) ini mengirimkan /menepatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA di ruang yang telah di sediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengadilan atau kesepakatan bersama

Tugas dari piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi Hukum, kondisi hukum, konsultasi hukum dan advis Hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2022 terdapat 1 (satu) lembaga yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Ternate yang membuka layanan dari hari Senin hingga Jum'at, lembaga tersebut adalah **YAYASAN LEMBAGA**

**BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA** dengan Tim Penasehat Hukum yaitu

1. M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H
2. RIZKY SEPTIAN, S.H., M.H
3. FAHRID GALITAN, S.H
4. FAIJA BAHMID, S.H
5. NAIMAN LEK, S.H
6. SARMAN RIADI, S.H
7. RUDI Hi. JAFAR, S.H
8. FAHMI SUBUR, S.H
9. NURUL MULYANI, S.H
10. M. JAIS UMAR, S.H
11. SAIFUL DJANWAR, S.H
12. ILWAN LA UPE, S.H., M.H
13. ABDULLAH ISMAIL, S.H
14. MIRJAN MARSAOLY, S.H
15. RAFIQ HAFITZH, S.H
16. WAHYUNINGSIH MADILIS, S.H

Sebagai komitmen mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA eselon I Badan Peradilan Umum pada tahun anggaran 2022. Anggaran untuk diberikan layanan POSBAKUM ini sebesar **Rp.40.800.000,.(Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

Pada Tahun 2022 ini Layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Ternate telah mendampingi 14 (empat belas) perkara, yaitu:

No	NO PERKARA	NAMA TERDAKWA	KUALIFIKASI PERKARA
1	139/Pid.Sus/2022/PN Tte	MUHAMMAD SHABRI AKBAR Alias AMAT	Perlindungan Anak
2	138/Pid.Sus/2022/PN Tte	MUHAMMAD SHABRI AKBAR Alias AMAT	Perlindungan Anak
3	123/Pid.Sus/2022/PN Tte	DIDIT ALI Alias DIDIT	Perlindungan Anak
4	58/Pid.B/2022/PN Tte	MUHAMMAD RIZAL SALAMPE Alias RIZAL	Penggelapan
5	70/Pid.Sus/2022/PN Tte	NURMINI ABD HAYAT Alias MINI	Kesehatan
6	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte	REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE	Perlindungan Anak
7	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte	RIZKI IRWAN Alias IKI	Narkotika
8	11/Pid.Sus-Anak/2022/PN	1.VERGIAWAN	Pencurian



	Tte	MOCHTAR Alias ACO 2.NIJAR LUTFI Alias NIJAR 3.RIFANDI R. SALIM Alias KOCES	
9	23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte	TAUFIK, SS Bin ALIM M. DJAFRI	Tipikor
10	3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte	ABDUL HAMID RAHIM Alias HAMID	Tipikor
11	4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte	M. SALEH ABU	Tipikor
12	16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte	SAFRUDIN SAFAR, S.Pd Alias UDI	Tipikor
13	5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte	YORDAN HAYATI Alias ODAN	Tipikor
14	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte	MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST	Tipikor

*Tabel Pelayanan Perkara Posbakum*

## 2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Ternate mendapatkan anggaran belanja Sidang Keliling sebesar Rp. 270.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%. Untuk pelaksanaan sidang keliling, Pengadilan Negeri Ternate melakukan sidang diluar Pengadilan yaitu sidang dilaksanakan pada Zitting Plaatz Jailolo yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan untuk menjangkanya harus menggunakan kapal laut atau speed boat dengan waktu tempuh 2 Jam perjalanan. Berikut adalah daftar perkara yang di sidangkannya di Zitting Plaatz Jailolo :

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa
1	80/Pdt.G/2022/PN Tte	1.NURHAYATI HUSEN 2.RAHMAT HUSEN 3.NEMA HUSEN 4.HINDUN HUSEN 5.RAMLAH HUSEN
2	73/Pdt.G/2022/PN Tte	1.ISRA TOUTO SLAMET 2.EDA SLAMET 3.YUSRI SLAMET 4.IKSAN TOUTO SLAMET
3	59/Pdt.G/2022/PN Tte	1.MUHAMMAD NUR MAN ALIAS NUR TOLOA 2.PIMPINAN YAYASAN PONDOK PESENTREN AL-FATAH CABANG TEMBORO
4	52/Pdt.G/2022/PN Tte	MUKHLIS L. TJUN
5	51/Pdt.G/2022/PN Tte	1.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Wali Kota Ternate Cq Camat Kecamatan Pulau Ternate 2.Pemerintah RI, Cq Kementrian Agraria Dan

		Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate
6	46/Pid.Sus/2021/PN Tte	1.Helmi Budiawan 2.Nureni Mansur Turut Tergugat: 2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) C.q Camat Kota Ternate Tengah 3.Badan Pertanahan Nasional Ternate
7	43/Pdt.G/2022/PN Tte	Tergugat: 1.KETUA DPD PDI PERJUANGAN MALUKU UTARA/ MUHAMMAD SENEN Tergugat 1 2.Sekertaris DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI MALUKU UTARA/ ASRUL RASYID ICHSAN Tergugat 2 3.KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN / MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Tergugat 3 4.SEKERTARIS JENDERAL DPP PDI PERJUANGAN/ HASTO KRISTIYANTO
8	32/Pdt.G/2022/PN Tte	1.HI. MASIDINGO KARIM 2.NURBAYA A. RASID Turut Tergugat: 1.KELURAHAN DUFA DUFA 2.Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate
9	25/Pdt.G/2022/PN Tte	1.GUSTAM TAMIN 2.GUSMIYATI TAMIN 3.NURHAN TAMIN 4.MASITA TAMIN 5.ABDUL HALIK TAMIN 6.MUTIA TAMIN 7.IDHAM TAMIN 8.AMSINA TAMIN 9.DIANTRI TAMIN 10.TRISNALIA TAMIN 11.FATAHA AHMAD 12.MUHAMMAD RIZKULA 13.MULYANTO Turut Tergugat: 1.YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA 2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE
10	18/Pdt.G/2022/PN Tte	1.Erwin Tekeng 2.Marten Sopacua 3.Frans Tendean
11	11/Pdt.G/2022/PN Tte	1.Djufri Djaid 2.Muhammad Iqbal,SE 3.Syamsudin Latif 4.Nurjana Syamsu 5.Nurdiana,Amd.Keb 6.Dede Oka 7.Ahli Waris Almh. Halima Syamsu, (1. Aisa Syamsu, 2. Nurjana Syamsu), 8.Ahli waris Alm. Sarif Latif (1.Nurain Basir, 2.Muhammad Rifan Sarif dan 3.Muhammad Rizal Sarif) Turut Tergugat:

		1.Kapala Kelurahan Toboleu
12	10/Pdt.G/2022/PN Tte	1.Djufri Djaid 2.Muhammad Iqbal,SE 3.Syamsudin Latif 4.Nurjana Syamsu 5.Nurdiana,Amd.Keb 6.Dede Oka 7.Ahli Waris Almh. Halima Syamsu, (1. Aisa Syamsu, 2. Nurjana Syamsu), 8.Ahli waris Alm. Sarif Latif (1.Nurain Basir, 2.Muhammad Rifan Sarif dan 3.Muhammad Rizal Sarif) Turut Tergugat: 1.Kapala Kelurahan Toboleu 2.Kantor Pertanahan Kota Ternate
13	8/Pdt.G/2022/PN Tte	SUBHAN M. NUR
14	5/Pdt.G/2022/PN Tte	1.Ketua Dewan Pimpinan Wilaya Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara 2.Sekretaris Dewan Pimpinan Wilaya Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara 3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) 4.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
15	3/Pdt.G/2022/PN Tte	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE
16	16/Pdt.G.S/2022/PN Tte	JUNIA LIDYA DATAU

*Tabel Perkara Zitting Plaatz*

### 3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di Pengadilan.

Layanan prodeo di Pengadilan Negeri Ternate selama 3 tahun terakhir belum dapat menyentuh masyarakat di wilayah hukum Pengadilan karena belum ada masyarakat yang mengajukan untuk mendapatkan layanan ini. Secara umum masih dilakukan evaluasi kebijakan di Pengadilan Negeri Ternate terhadap prodeo baik dari sosialisai kepada masyarakat tentang adanya prodeo maupun terhadap kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan ini.

Tahun anggaran 2022 DIPA Pengadilan Negeri Ternate memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.760.000,- untuk jenis layanan pembebasan Biaya Perkara ini, dan terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau 21.74%,sehingga selama tahun 2022 terdapat kegiatan

yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA telah memiliki Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja, meskipun masih ada rangkap pekerjaan yang dilakukan.

Adapun Sumber Daya Manusia tersebut terdiri atas tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana dan tenaga Honorer. Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA memiliki Hakim karier sebanyak 8 (delapan) Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Ad Hoc berjumlah 4 (empat) orang, Pegawai berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dan honorer berjumlah 13 (tiga belas) orang. Berikut nama-nama Hakim, Hakim Ad Hoc, Pegawai dan Honorer pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA:

1. Hakim Karier : 8 Orang
  2. Hakim AdHoc : 4 Orang
  3. Pegawai : 38 Orang
  4. Tenaga Honorer : 13 Orang
- T O T A L : 63 Orang**

No	Nama	Jabatan	TMT Jabatan	Gol	Pendidikan
1	Haryanta, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	2022-12-27	IV/c	PASCASAR JANA
2	Achmad Ukayat, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	2020-11-23	IV/c	PASCASAR JANA
3	Rose L Sainawal, S.AP.	Panitera Tingkat Pertama	2020-10-05	IV/a	STRATA I
4	Budi Setiawan, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	2020-12-17	IV/a	STRATA I
5	Patma, S.H.,M.H.	Sekretaris	2020-10-05	IV/a	PASCASAR JANA
6	Yuliantini Burhan, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	2021-10-15	III/d	STRATA I
7	Zadrak Paly, S.H.	Panitera Pengganti	2020-10-05	III/d	STRATA I
8	Bakhtiar, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP	2021-10-15	III/d	STRATA I
9	Ulfa Rery, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	2019-04-04	III/d	STRATA I
10	Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.,	Hakim Tingkat Pertama	2020-03-13	III/d	PASCASAR JANA

No	Nama	Jabatan	TMT Jabatan	Gol	Pendidikan
	M.H.				
11	Ferdinal, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-02	III/d	PASCASAR JANA
12	Irwan Hamid, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	2020-06-22	III/d	PASCASAR JANA
13	Kadar Noh, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	2020-07-06	III/d	STRATA I
14	Herlina Hermansyah, S.H.	Panitera Muda	2022-03-14	III/d	STRATA I
15	Early Handayani, S.H.	Panitera Pengganti	2022-03-21	III/d	STRATA I
16	Dian Asriyani, S.KOM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	2021-10-15	III/d	STRATA I
17	Rusli, S.H.	Panitera Pengganti	2020-10-05	III/d	STRATA I
18	Marthina Bungin, S.H	Panitera Muda	2021-05-11	III/d	STRATA I
19	Sumartini Wardio,	Panitera Muda	2020-10-05	III/c	SLTA
20	Jefri Pratama, S.H., M.H.	Panitera Muda	2022-03-14	III/c	PASCASAR JANA
21	Erny Hs Mailaha, S.H.	Panitera Pengganti	2021-11-01	III/b	STRATA I
22	Ramli Rumonin,	Juru Sita	2020-10-05	III/b	SLTA
23	Rustiana Madikoe, S.H.	Panitera Pengganti	2020-10-05	III/b	STRATA I
24	Enong Kailul, S.H.	Panitera Pengganti	2020-10-05	III/b	SLTA
25	Abd Halik Buamona, S.H.	Panitera Pengganti	2020-10-05	III/b	STRATA I
26	Sista Rahitya, S.H.	Panitera Pengganti	2021-11-01	III/b	STRATA I
27	Rahmawati Darota, Amd.	Juru Sita Pengganti	2020-10-05	III/b	DIPLOMA III
28	Puji Astuty, A,md.	Pengelola Perkara	2021-05-18	III/b	DIPLOMA III
29	Dahlan Lafuku, A.Md.	Juru Sita	2021-10-26	III/b	DIPLOMA III
30	Ferawati, A.md.	Panitera Pengganti	2021-11-01	III/b	DIPLOMA III
31	Yuyun Renhoat, S.H.	Juru Sita	2022-03-14	III/b	STRATA I
32	Rahmi, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	2020-11-05	III/b	STRATA I
33	Asmyati Yusuf, S.H.	Juru Sita	2021-11-01	III/b	STRATA I
34	Julaiha Abd Kadir, S.H.	Panitera Pengganti	2021-11-01	III/a	STRATA I
35	Florence Nancy Mahoklory, S.H.	Panitera Pengganti	2021-11-01	III/a	STRATA I
36	Halil Salim, S.H.	Juru Sita Pengganti	2020-10-05	III/a	STRATA I
37	Edison Duwila, S.H.	Juru Sita	2021-10-	III/a	STRATA I

No	Nama	Jabatan	TMT Jabatan	Gol	Pendidikan
			26		
38	Handika Zulmi, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	2022-04-01	III/a	STRATA I
39	Martogi Roland Pahala, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	2022-04-25	III/a	STRATA I
40	Abi Daud Alfarisi, S.EI.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2022-04-25	III/a	STRATA I
41	Samsudin Danel,	Juru Sita	2020-10-05	II/d	SLTA
42	Susan Puasa Kharie,	Juru Sita Pengganti	2020-10-05	II/d	SLTA
43	Melia Andari Nada,	Pengadministrasian Registrasi Perkara	2022-12-01	II/d	SLTA
44	Samhadi, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2021-04-27	-	PASCASARJANA
45	M Iqbal Bopeng, S.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	2018-07-16	II/c	STRATA I
46	Thobari, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	2021-03-25		PASCASARJANA
47	R. Moh Yakob Widodo, S.H.,M.Hum.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2022-01-10	II/c	PASCASARJANA
48	Sri Oktianingsih, A.Md.A.B	Pengadministrasian Hukum	2022-04-25	II/c	DIPLOMA III
49	Chikal Utami Puteri, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara	2022-05-09	II/c	DIPLOMA III
50	Syaiful Manabung,	Juru Sita Pengganti	2020-10-05	II/c	SLTA

*Tabel Daftar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate*

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TMT	Pendidikan
1	Rismawati Lanae	Pengadministrasian Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	06 Februari 2008	SLTA
2	Darwin R. Adam	Pengadministrasian Persuratan	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	06 Februari 2008	SLTA
3	Sukarman Waibot	Analisis Perkara Peradilan	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	02 Januari 2014	S1
4	Sugiman Syafrudin	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	02 Januari 2014	SLTA
5	Rahmat Sadek	Pengadministrasian Registrasi Perkara	Panitera Muda Hukum	04 Januari 2016	SLTA

6	Fahrizal A. Syahjuan	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	04 Januari 2016	SLTA
7	Farman Hasan	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	04 Januari 2016	SMK
8	Uci Wally	Analisis Tata Laksana	Panitera Muda Hukum	04 Januari 2017	S1
9	Rosdiana Yusman	Pengadministrasian Perpustakaan	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	04 Januari 2017	SLTA
10	Maulana Samsudin	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	04 Januari 2018	SLTA
11	Safir Ahmad	Pengadministrasian Penanganan Perkara	Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	01 Agustus 2019	SLTA
12	Abdul Haris A. Musa	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	22 November 2021	D III
13	Julkifli Muksin	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	01 Desember 2021	D III

*Tabel Daftar Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Ternate*

### 1. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Jabatan

Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA yang ditinjau dari segi Jabatan menunjukkan bahwa terdapat kekosongan di bagian Panitera Muda Perdata yang sementara ini digantikan oleh Pelaksana Tugas dari Panitera Pengganti. Selain itu, saat ini Pengadilan Negeri Ternate masih kekurangan Staf karena untuk bagian Kesekretariatan dari sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana tidak diisi oleh PNS, hanya diisi oleh Tenaga Honorer yang diperbantukan. Posisi bendahara juga diisi oleh pegawai dengan jabatan Juru Sita Pengganti.

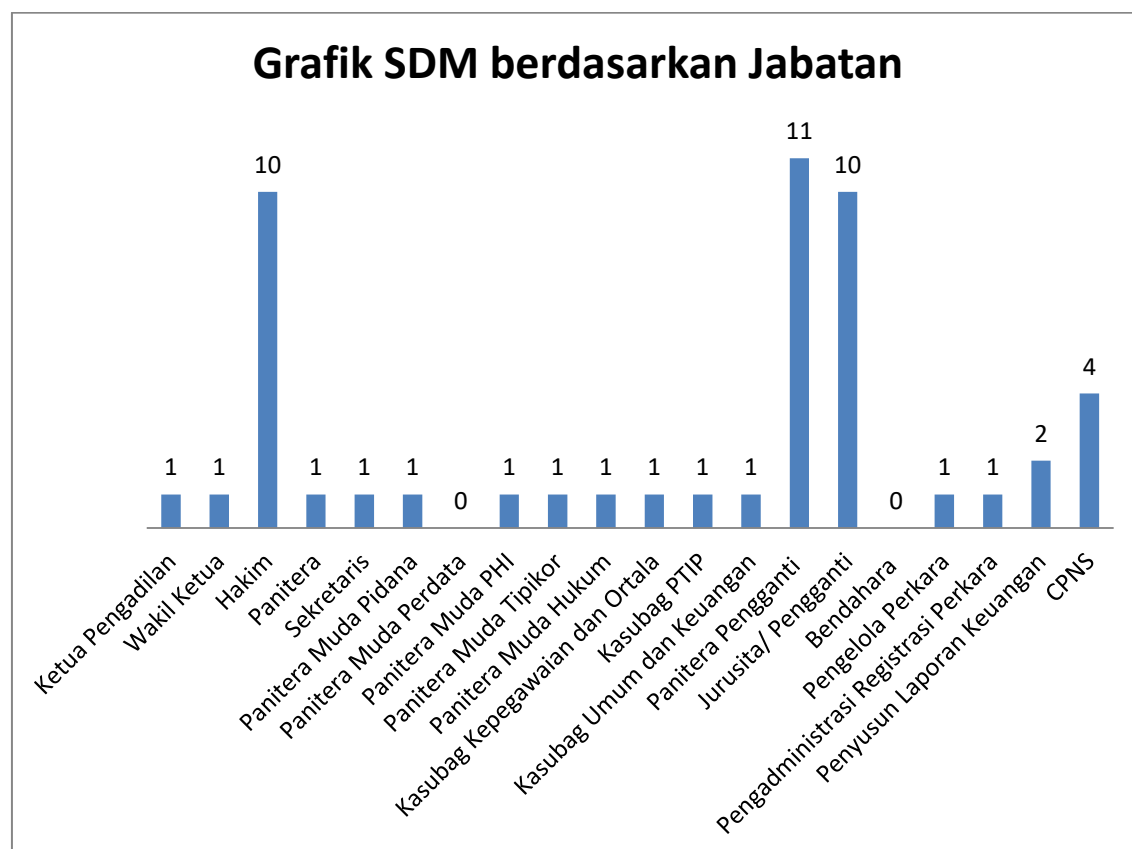


Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada Tabel berikut dibawah ini

No	Jabatan	Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	Ketua Pengadilan	-	-	-	-	1	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	1	-	1 orang
3	Hakim	-	-	8	2	-	-	10 orang
4	Panitera	-	-	-	-	1	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1 orang
6	Panitera Muda Pidana	-	-	-	1	-	-	1 orang
7	Panitera Muda Perdata	-	-	-	-	-	-	- orang
8	Panitera Muda PHI	-	-	-	1	-	-	1 orang
9	Panitera Muda Tipikor	-	-	-	1	-	-	1 orang
10	Panitera Muda Hukum	-	-	1	-	-	-	1 orang
11	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	-	-	-	1	-	-	1 orang
12	Kasubag PTIP	-	-	1	-	-	-	1 orang
13	Kasubag Umum dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	1 orang
14	Panitera Pengganti	-	-	4	7	-	-	11 orang
15	Jurusita/ Pengganti	2	2	4	2	-	-	10 orang
16	Bendahara	-	-	-	-	-	-	- orang
17	Pengelola Perkara	-	-	-	1	-	-	1 orang
18	Pengadministrasi Registrasi Perkara	-	1	-	-	-	-	1 orang
19	Penyusun Laporan Keuangan	-	-	1	1	-	-	2 orang
20	CPNS	2	-	2	-	-	-	4 orang
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>50 orang</b>

Tabel Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Jabatan

Sedangkan untuk melihat Grafik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Jabatan tersaji pada Grafik dibawah ini:



Gbr. Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Jabatan

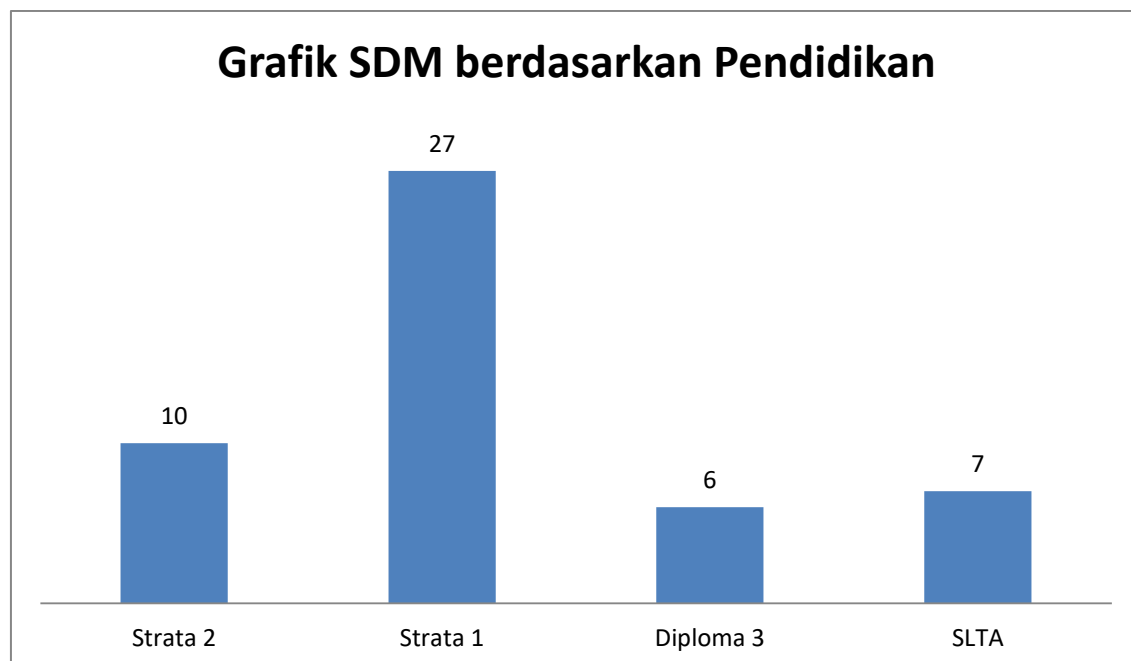
## 2. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Pendidikan

Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA yang ditinjau dari segi Pendidikan menempatkan Jumlah terbanyak adalah Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, kemudian diikuti pendidikan Strata 2 (S.2) sebanyak 10 (sepuluh) orang SLTA/ sederajat sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk tingkat serta yang paling sedikit adalah Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan Diploma 3 hanya 6 (enam) orang. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel berikut dibawah ini:

No	Pendidikan	Gol II		Gol III		Gol IV		Gol -		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Strata 2	-	-	3	1	2	1	3	-	10 orang
2	Strata 1	-	-	10	14	1	1	1	-	27 orang
3	Diploma 3	-	2	1	3	-	-	-	-	6 orang
4	SLTA	1	2	2	2	-	-	-	-	7 orang
<b>TOTAL</b>										<b>50 orang</b>

*Tabel Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Pendidikan*

Sedangkan untuk melihat Grafik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Pendidikan tersaji pada Grafik dibawah ini:



*Gbr. Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Pendidikan*

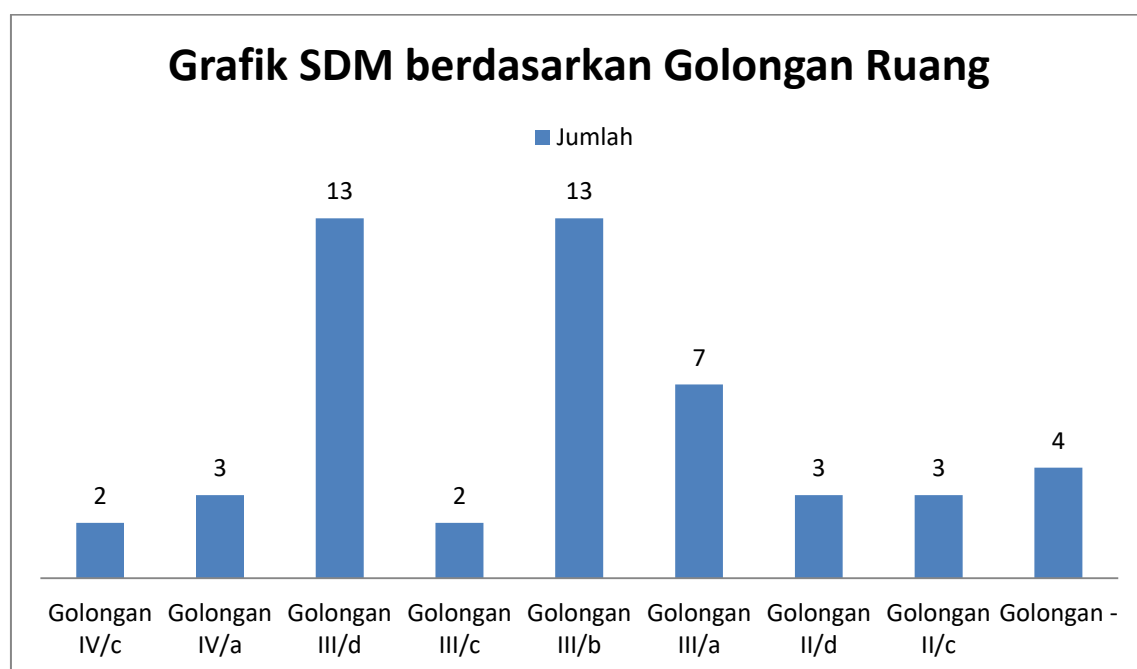
### 3. Statistik Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Golongan/ Ruang

Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA yang ditinjau dari segi Golongan/ Ruang menempatkan Jumlah terbanyak adalah SDM dengan Golongan/Ruang Penata (III/d) dan (III/b) yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang, selanjutnya adalah SDM dengan Golongan/Ruang Penata Muda (III/a) sebanyak 7 (tujuh) orang. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada Tabel berikut dibawah ini:

No	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	2	-	2 orang
2	Golongan IV/a	1	2	3 orang
3	Golongan III/d	6	7	13 orang
4	Golongan III/c	1	1	2 orang
5	Golongan III/b	4	9	13 orang
6	Golongan III/a	5	2	7 orang
7	Golongan II/d	1	2	3 orang
8	Golongan II/c	1	2	3 orang
9	Golongan -	4	-	4 orang
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50 orang</b>

Tabel Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Golongan Ruang

Sedangkan untuk melihat Grafik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasarkan Golongan/Ruang tersaji pada Grafik dibawah ini:



Gbr. Statistik SDM Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Golongan/Ruang

## B. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### 1. Mutasi Keluar

NO	NAMA	TGL MUTASI	SATKER TUJUAN	NOMOR SK
1	Rudi Wibowo, S.H.,M.H.	23-02-2022	PN Soa Sio	27/KMA/SK/I/2022
2	M. Syahrul Ratuaela, S.H.	15-03-2022	PN Sanana	50/KMA/SK/II/2022
3	Aminul Rahman,S.H.,M.H	22-04-2022	PN Makasar	10/KMA/SK/I/2022
4	Janne Ju, S.H.	01-12-2022	PT Manado	2443/DJU/SK/KP0 4.5/10/2022
5	M. Hangga, S.H.	01-12-2022	PN Ternate Kelas IA	2443/DJU/SK/KP0 4.5/10/2022
6	Surida	01-12-2022	PN Ambon	2443/DJU/SK/KP0 4.5/10/2022
7	Achmad Ukayat,S.H.,M.H.	29-12-2022	PN Sumber	2457/DJU/SK/KP.0 4.5/11/2022
8	Iwan A. Warsita,S.H.,M.Hum	22-12-2022	PN Blitar	2457/DJU/SK/KP.0 4.5/11/2022

*Tabel Daftar Mutasi Keluar SDM*

### 2. Mutasi Masuk

NO	NAMA	TGL MUTASI	SATKER ASAL	NOMOR SK
1	R.Moh. Yakob Widodo, S.H.,M.Hum	09-02-2022	Instansi Luar	11/KMA/SK/I/2022
2	Jefri Pratama, S.H.,M.H.	14-03-2022	PN Ternate Kelas IA	50/KMA/SK/II/2022
3	Early Handayani. S.H.	21-03-2022	PN Pacitan	52/KMA/SK/II/2022

*Tabel Daftar Mutasi Masuk SDM*

## C. Promosi

Secara teknis, promosi bagi Pegawai didasarkan pada Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KMA 125 tahun 2009, Pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2002, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Pengangkatan CPNS sebanyak 4 orang, terlihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA	TMT	NOMOR SK
1	Abi Daud Alfarisi, S.EI.	25-04-2022	1459/SEK/CPNS.04.1/SK/I/2022
2	Martogi Roland Pahala, S.H.	25-04-2022	1458/SEK/CPNS.04.1/SK/I/2022
3	Chikal Utami Puteri, A.Md.	09-05-2022	1460/SEK/CPNS.04.1/SK/I/2022
4	Sri Oktianingsih, A.Md., A.B	25-04-2022	2949/SEK/CPNS.04.1/SK/I/2022

*Tabel Daftar Pengangkatan CPNS*

Pengusulan promosi kenaikan pangkat untuk tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	PANGKAT LAMA		PANGKAT BARU	
			GOL.	TMT	GOL.	TMT
1.	Marthina Bungin	196906121992032004	III/c	1-4-2016	III/d	1-4-2022
2.	Rusli, S.H.	197908282009121004	III/c	1-4-2018	III/d	1-4-2022
3.	Asmiyati Yusuf, S.H.	198302112002122000	III/a	1-4-2018	III/b	1-4-2022
4.	Susan Puasa Kharie	198812132009122001	II/c	1-4-2018	II/d	1-4-2022
5.	Melia Andari Nada	198912262009122001	II/c	1-4-2018	II/d	1-4-2022
6.	Syaiful Manabung	198002272014081001	II/b	1 Okt. 2018	II/c	1-10-2022

*Tabel Daftar Promosi Kenaikan Pangkat*

Sedangkan promosi jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	
			LAMA	BARU
1	Yuyun Renhoat, S.H	198506222009042012	Jurusita Pengganti	Jursita
2	Herlina Hermansayah, S.H	198007202007042001	Panmud Hukum	Panmud Pidana

*Tabel Daftar Promosi Jabatan SDM*

#### D. Pensiun

Berkaitan dengan Pensiun, untuk Tahun 2022 belum ada Pegawai pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA yang telah memasuki masa Pensiun.

#### E. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI	SDM YANG MENGIKUTI
1	Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Bendahara	Rahmawati Darota
2	Kegiatan E-Learning Bendahara	Handika Zulmi
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penerapan Keadilan Restoratif	Irwan Hamid
4	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan	Budi Setiawan
5	Bimtek Bidang Kepaniteraan Sewilayah Hukum Maluku Utara	1. Erny H.S. Mailaha 2. Sista Rahitya 3. Dahlan Lafuku 4. Asmiyati Yusuf 5. Halil Salim 6. Muhammad Hangga
6	Bimtek Bidang Kepagawaian dan Teknologi Informasi Sewilayah PT Maluku Utara	1. Patma 2. Dian Asriyani 3. Rismawati Lanae 4. Abdul Haris A. Musa
7	Pelatihan Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup Angkatan XVI Tahun 2022 Sewilayah MA RI	Ferdinal
8	Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Restoratif Lingkungan Peradilan Umum MA RI	1. Patma 2. Bakhtiar 3. Sista Rahitya 4. Abdul Haris A. Musa
9	Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Wilayah Maluku Utara	1. Budi Setiawan 2. Khadijah A. Rumaellan 3. R. Moh. Yakob Widodo
10	Diklat Latsar CPNS di Balai Diklat Keagamaan Ambon	1. Abi Daud Alfarisi 2. Martogi Roland Pahala 3. Sri Oktianingsih 4. Chikal Utami Puteri
11	Kegiatan Penguatan dan Penyelarasan Antar Jejaring Aparat Penegak Hukum	Kadar Noh
12	Bimtek Yudisial Eksekusi Putusan Perdata Bagi Hakim dan Panitera Tinglat Pertama Sewilayah Hukum Ambon	1. Rose L. Sainawal 2. Achmad Ukayat
13	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan AUPPAW TW III Tahun 2022 Sewilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara	1. Yuliantini Burhan 2. Rahmawati Darota 3. Handika Zulmi 4. Chikal Utami Puteri
14	Pelatihan Sertifikasi, Mediator Bagi Hakim dan Panitera di Peradilan MA RI	1. Erny H.S. Mailaha 2. Julaiha Abd. Kadir

Tabel Daftar Diklat SDM

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2022 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah:

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 12.273.766.000 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 501.260.000 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

##### a) Belanja Pegawai

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	KET
1	Belanja Pegawai	Rp. 7.337.238.000,-	Rp. 6.845.954.827,-	93.30%

*Tabel Daftar Uraian Belanja Pegawai*

##### b) Belanja barang.

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	KET
1	Belanja Barang	Rp. 2.823.528.000,-	Rp. 2.476.263.123,-	87.70%

*Tabel Daftar Uraian Belanja Barang*

#### 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	KET
1	Belanja Modal	Rp. 2.113.000.000,-	Rp. 2.075.005.822,-	98.20%

*Tabel Daftar Uraian Belanja Modal Sarana dan Prasarana*

#### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	KET
----	--------	------	-----------	-----

1	Belanja Barang	Rp.501.260.000,	Rp.481.324.500,	96,02%
---	----------------	-----------------	-----------------	--------

Tabel Daftar Uraian Belanja Barang Peningkatan Manajemen Peradilan

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### 1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA digunakan untuk kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah	Keterangan
1	Nuku, Kab. Halmahera Barat	1204 m2	Balai Sidang Jailolo
2	Pattimura, Kab. Halmahera Selatan	1000 m2	Balai Sidang Saketa
3	Kel. Tabona, Kota Ternate	6117 m2	Tanah Tipikor
4	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	1712 m2	Bangunan Gedung Kantor
5	Salahudin, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
6	Salahudin, Kota Ternate	190 m2	RD. Hakim
7	Kompi Bantuan, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
8	Kolontjutju, Kota Ternate	500 m2	RD. Hakim
9	Batu Anteru, Kota Ternate	200 m2	RD. Panitera
10	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	372 m2	RD. Ketua
11	Salahudin, Kota Ternate	234 m2	RD. Wakil
12	SLTP 05, Kota Ternate	213 m2	RD. Hakim

Tabel Daftar Tanah

### 2. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

Gedung dan bangunan yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut dibawah ini:

No	Nama/Type Gedung/Bangunan	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Kondisi			Ket
				B	RR	RB	
1	RD. Hakim Tipe C	70 m2	Salahudin	√			3 Buah
2	RD. Hakim Tipe C	70 m2	Kolontjutju	√			2 Buah



3	RD. Panitera Tipe C	70 m2	Batu Anteru	√	1 Buah
4	RD. Hakim Tipe C	70 m2	Kompi Bantuan	√	1 Buah
5	RD. Ketua Tipe B	120 m2	Jl. Gelora Kie Raha	√	1 Buah
6	RD. Hakim Tipe C	70 m2	SLTP 05	√	1 Buah
7	RD. Wakil Tipe C	70 m2	Salahudin	√	1 Buah

*Tabel Daftar Gedung dan Bangunan*

### 3. Bangunan Gedung Kantor

Sarana/prasarana gedung (ruangan yang tersedia) di kantor Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA (Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate) adalah sebagai berikut:

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Hakim	3	
6	Ruang Panitera Pengganti	1	
7	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
8	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
10	Ruang Kesekretariatan	3	
11	Ruang Kepaniteraan	5	
12	Ruang Sidang Umum	3	
13	Ruang Sidang Anak	1	
14	Ruang Tunggu Saksi Anak	1	
15	Ruang Bapas	-	
16	Ruang Mediasi/Diversi	1	
17	Ruang Lobby	1	
18	Ruang Arsip	1	
19	Ruang Arsip Eksekusi	-	
20	Ruang Perpustakaan	1	
21	Ruang Server	1	
22	Ruang Rapat ICPE (Media Center)	1	
23	Ruang Posbakum/Tunggu Advokat	1	
24	Ruang Tunggu Jaksa	1	
25	Ruang Tahanan	2	
26	Ruang Tunggu Pengunjung Tahanan	1	
27	Gudang	-	
28	Kamar Mandi	15	
29	Pantry	1	
30	Ruang Laktasi	1	

*Tabel Daftar Sarana dan Prasarana*

#### 4. Bangunan Balai Sidang (Zitting Platz)

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1 A memiliki 2 (dua) Bangunan Balai Sidang yang terletak di luar Kota Ternate yaitu Balai Sidang Jailolo yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan Balai Sidang Saketa yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, dari kedua Bangunan Balai Sidang tersebut yang masih aktif dipergunakan sampai saat ini adalah Bangunan Balai Sidang Jailolo sedangkan Balai Sidang Seketa sudah lama tidak gunakan karena keadaan dan kondisi bangunan yang rusak berat. Bangunan Balai Sidang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Luas M2	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Bangunan Balai Sidang	640	1983	✓			Jailolo Halmahera Barat
2.	Bangunan Balai Sidang	220	1981			✓	Saketa Halmahera Selatan

#### 5. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			B	RR	RB	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Toyota Kijang Capsul	31-12-2007			✓	Tidak layak pakai / jalan
2	Toyota Vios	15-02-2006	✓			Lengkap
3	Toyota Rush	13-12-2011	✓			Lengkap
4	Toyota Vios	30-01-2006	✓			Lengkap
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Honda Supra X	15-02-2006		✓		Sering service perbaikan
2	Honda Supra Fit	23-06-2008			✓	Tidak layak pakai / jalan
3	Honda Supra Fit	22-03-2002			✓	Tidak layak pakai / jalan
4	Honda Supra Fit	22-03-2002			✓	Tidak layak pakai / jalan
5	Yamaha Soul	13-12-2011		✓		Sering service perbaikan
6	Honda Supra Fit	15-02-2006			✓	Tidak layak pakai / jalan
7	Honda Supra Fit	10-04-2001			✓	Tidak layak

8	Honda Supra Fit	21-03-2005	√	pakai / jalan Tidak layak pakai / jalan
9	Honda Revo	23-06-2008	√	Sering service perbaikan
10	Honda Supra Fit	21-03-2005	√	Tidak layak pakai / jalan

*Tabel Daftar Kendaraan Dinas*

## 6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin (non Kendaraan Dinas) yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Lemari penyimpanan	4	-
2	Mesin foto copy	2	Rusak Berat 1 Unit
3	Lemari Besi / Metal	12	-
4	Lemari Kayu	49	-
5	Rak Besi	29	-
6	Filing Kabinet Besi	22	Rusak Berat 8 Unit
7	Filing Kabinet Kayu	7	Rusak Berat
8	Brandkas	4	-
9	Tabung Pemadam Api	3	-
10	Camera Control Television System	2	Rusak Berat 1 Paket
11	Papan visual	50	-
12	White board	2	Rusak Berat
13	Alat Pemotong kertas	2	Rusak berat
14	Hand Metal detector	2	Rusak Berat
15	Infocus	1	Rusak Berat
16	Pintu Elektrik	1	-
17	Perkakas Kantor lainnya	6	-
18	Alat kantor lainnya	6	-
19	Meja kerja kayu	96	-
20	Kursi besi/metal	118	-
21	Kursi Kayu	81	-
22	Sice	11	Rusak Berat 5 Buah
23	Bangku panjang kayu	55	Rusak berat 12 Buah
24	Meja rapat	3	Rusak berat 1
25	Meja Komputer	9	Rusak berat
26	Meja Receptionis	2	-

27	Mesin pemotong rumput	2	Rusak berat
28	AC Central	4	-
29	AC Split	55	Rusak berat 26
30	Televisi	10	-
31	Sound System	3	Rusak Berat 1 Buah
32	Lambang Garuda Pancasila	5	-
33	Tiang Bendera	12	Rusak Berat 2 Buah
34	Dispenser	32	Rusak Berat 8 Buah
35	Palu Sidang	8	Rusak Berat 3 Buah
36	Lambang Instansi	1	-
37	Vertikal Blind	1	-
38	Bendera Negara	10	-
39	Uninterruptible Power Supply	20	Rusak Berat 12
40	Camera Digital	1	-
41	LCD Monitor	3	-
42	Facsimile	2	-
43	Finger Printer	1	-
44	Genset	1	-
45	Kursi dorong	1	-
46	PC Unit	55	Rusak Berat 5 Buah
47	Laptop	35	Rusak Berat 8 Buah
48	Printer	45	Rusak berat 10 Buah
49	Scanner	4	Rusak Berat 1 Buah
50	server	2	-
51	Kursi Roda	2	-
52	Panic Button System, Alarm Indicator	1	-
53	Tempat Tidur Besi	1	-
54	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Rusak Berat
55	Partisi	11	-
56	Nakas	8	-
57	Meubelair Lainnya	2	Rusak Berat
58	Jam Elektronik	4	-
59	Kipas Angin	5	Rusak Berat 2 Buah
60	Loudspeaker	6	-
61	Wireless	1	-
62	Microphone	16	-
63	Handy Cam	1	Rusak Berat
64	Karpet	14	Rusak Berat

65	Bracket Standing Peralatan	2	-
66	Audio Mixing Console	1	-
67	Audio Visual	1	-
68	Microphone/Wireless MIC	2	-
69	Microphone/Boom Stand	2	-
70	Mixer Sound Sistem	1	-
71	Camera Conference	4	-
72	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	1	-
73	Telephone (PABX)	20	Rusak Berat
74	Handy Talky (HT)	1	-
75	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	1	-
76	Network Monitoring System	1	-
77	Switching Matrix and Server	1	-
78	Walker Polding	6	-
79	Personal Computer	6	-
80	Internet	1	-
81	Note Book	3	Rusak Berat
82	Serial Printer	2	-
83	Hub	1	-
84	Wireless Access Point	1	-
85	Automatic Terminal Information Service (ATIS)	1	-
86	Aid Hearing	2	-
87	Alat Musik Modern/Band	1	-
88	Buku Lainnya	19	-
89	Monografi	11	-
90	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lainnya	1	-
91	Jaringan Listrik Lainnya	1	-

*Tabel Daftar Peralatan dan Mesin*

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

#### 1. Implementasi e-court dilingkungan Peradilan Umum

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari empat fitur utama, yakni pendaftaran

perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*), pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018, maka ditunjukkan beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-court. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah mulai mempersiapkan diri untuk pelaksanaan proses beracara melalui sistem elektronik tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan Negeri Ternate yang telah melaksanakan atau menerapkan pendaftaran perkara melalui e-court.

Pada Tahun 2022 hampir seluruh proses persidangan pada Pengadilan Negeri Ternate dilaksanakan secara e-Court. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut dibawah ini.

NO	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
JUMLAH PERKARA MASUK	82	18	142
SECARA E-COURT	77	18	105
TIDAK MELALUI E-COURT	0	0	0
<b>PERSENTASE</b>	93,90%	100%	73,94%
<b>TOTAL RATA RATA</b>		<b>89,28%</b>	

*Tabel Daftar Proses Persidangan Secara e-Court*

## 2. Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik, seperti kita ketahui, bahwa masyarakat / para pencari keadilan sudah lama menganggap bahwa aparatur pemerintah (Pengadilan) melayani publik secara tidak maksimal. Oleh karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang harus dilaksanakan oleh semua instansi terutama di Pengadilan yang tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi juga menyadari betapa pentingnya pelayanan publik ini. Tentunya dalam hal ini perlu adanya Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat/pencari keadilan.

Perangkat Keras (*Hardware*) Pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP sebagai berikut:

1. Server SIPP : 1 Unit
2. Server Backup SIPP : 1 Unit
3. Mikrotik Router Board : 1 Unit
4. Akses Point : 6 Unit
5. Hub / Switch 32 Channel : 1 Unit

- 6. Bandwith Internet : 28 Mbps 1:1
- 7. Jaringan LAN : 15 Client
- 8. Jaringan WLAN : 28 Client
- 9. UPS Server : 1 Unit
- 10. PC / Laptop Client : 50 Unit

Perangkat Lunak (Software) pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP sebagai berikut:

- 1. Sistem Operasi Linux CentOS 7.7
- 2. Aplikasi SIPP Versi 4.0.1
- 3. Database Mysql (MariaDB)
- 4. Apache
- 5. PHP
- 6. FileZilla
- 7. PuTTY
- 8. SQLyog

➤ Rasio Penanganan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Ternate Kelas IA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara	Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian	Total
501- 1000	151.60	521.67	108.47	165.98	947.72

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit.

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari



publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar. Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung sejak Januari 2018 dengan Predikat “A” (Excellent) dengan nilai Akreditasi 700, dan berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 3007/DJU/SK/OT.01.3/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2019, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA kembali memperoleh Predikat “A” Excellent dengan nilai 703. Hingga 31 Maret 2021 Pengadilan Negeri Ternate mampu mempertahankan predikat dengan memperoleh nilai “A” Excellent.



Gbr. Sertifikat APM

Pencapaian tersebut tentunya telah sesuai dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu bagi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu

Peradilan Umum – ICPE dari Mahkamah Agung. Hal – hal secara umum yang diberikan penilaian dalam proses Akreditasi seperti :

- Leadership (Kepemimpinan)
- Customer Focus (Fokus Pelanggan / Pengguna)
- Process Management (Manajemen Proses)
- Strategic Planning (Perencanaan Strategis)
- Resource Management (Manajemen Sumber Daya)
- Document System (Sistem Dokumen)
- Performance Result (Hasil Kinerja)

Dimana ruang lingkup yang telah melalui proses Akreditasi pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA meliputi :

- Manajemen Peradilan
- Administrasi Perkara
- Administrasi Persidangan
- Administrasi Umum
- Pelayanan Publik
- Pengelolaan kas
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengawasan
- Penanganan Pengaduan

Unit-unit di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

- Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
- Hakim / Majelis Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Kepaniteraan ( Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum)
- Panitera Pengganti
- Jurusita / Jurusita Pengganti
- Kesekretariatan (Subbag Umum dan Keuangan, Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA memiliki **VISI** “Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Pengadilan Negeri Ternate” dan mengemban **MISI** :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA.

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA didalam menjalankan tupoksinya juga memiliki motto “Pelayanan Prima dan Putusan Berkualitas”

#### **B. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA pada Tahun 2019 telah menerapkan mencanangkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 18 Februari 2019 yang dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat beserta seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas I A, dan tepat pada tanggal 30 Desember 2019 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA telah menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dan pada akhir Tahun 2021, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas 1A kembali mendapat evaluasi I Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan berhasil menduduki peringkat kedua secara Nasional dengan memperoleh **Nilai 91,62 predikat A.**

Pada tahun 2022 Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate ditangguhkan.

#### **C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA Nomor W28-U2/3316/SK/KPN/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Petugas Piket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA dan terbagi atas 6 layanan yaitu : Meja Pelayanan Umum dan Keuangan, Meja Pelayanan Kepaniteraan Tipikor, Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata, Meja Pelayanan Hukum, Meja Pelayanan Kepaniteraan PHI dan Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana.

Jenis layanan yang diberikan oleh masing – masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA tahun 2022 adalah :

1. Meja Pelayanan Umum
  - Penerimaan surat masuk : 1.172 Surat
  - Surat Keluar : 3.547 Surat
2. Meja Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

- Penerimaan pelimpahan perkara : 46 layanan.
  - Pendaftaran permohonan praperadilan : Nihil
  - Penerimaan permohonan upaya hukum : layanan
  - Penerimaan memori / kontra memori : 33 layanan
  - Penerimaan permohonan izin penyitaan : 1 layanan
  - Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 1 Layanan
  - Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 3 Layanan
  - Penerimaan permohonan izin besuk : Nihil
3. Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata
- Pendaftaran perkara : 242 layanan
  - Pendaftaran permohonan upaya hukum : 30 layanan
  - Penerimaan memori / kontra memori : 20 layanan
  - Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 0 layanan
  - Pendaftaran permohonan Eksekusi : 12 layanan
  - Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : 0 layanan
  - Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : Nihil
4. Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum
- Pendaftaran Surat Kuasa : 427 layanan.
  - Permohonan Surat Kuasa Insidentil : 2 layanan.
  - Pendaftaran Badan Hukum : 5 layanan.
  - Permintaan Salinan Putusan : 74 layanan.
  - Permintaan surat keterangan melalui eraterang : 329 layanan.
  - Permohonan surat keterangan : 330 layanan.
  - Legalisir surat : 9 layanan.
  - Permohonan Penelitian : 16 layanan.
5. Meja Pelayanan Kepaniteraan PHI
- Pendaftaran perkara : 12 layanan
  - Pendaftaran permohonan upaya hukum : 11 layanan
  - Penerimaan memori / kontra memori : 3 layanan
  - Penerimaan pendaftaran perjanjian bersama : 6 layanan
  - Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : Nihil
6. Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :
- Penerimaan pelimpahan perkara : 271 layanan
  - Pendaftaran permohonan praperadilan : 8 layanan
  - Penerimaan permohonan upaya hukum : 32 layanan
  - Penerimaan memori / kontra memori : 30 layanan
  - Penerimaan permohonan izin penyitaan : 236 layanan
  - Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 43 layanan
  - Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 280 layanan

- Penerimaan permohonan izin besuk : Nihil

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).



Gbr.Meja Pelayanan PTSP Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariat

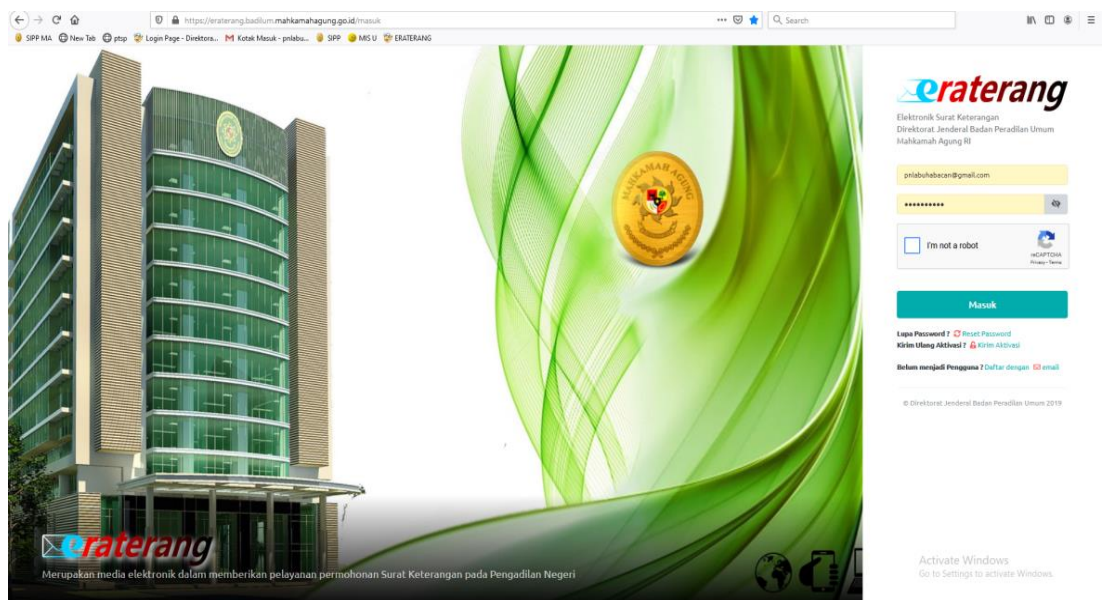
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN NEGERI LABUHA

Register Buku Tamu

#	Tanggal	Nama Register	Tujuan	Nama Tamu	Keterangan
1	15/09/2020	205/2020	Ketua Pengadilan	Muhamamad Irfan	Kunjungan Silaturahmi
2	09/09/2020	204/2020	Ketua Pengadilan	Bank BSM	Silaturahmi
3	03/09/2020	203/2020	Ketua Pengadilan	HAJID A RAJIAK	Kordinasi Dengan Ketua Pengadilan Negeri Labuha
4	28/08/2020	202/2020	Ketua Pengadilan	Muklis Minggu	mengenal kerja sama dengan lembaga pengawasan penyelenggara transportasi
5	27/08/2020	201/2020	Paritera	HJUD M NUR AJAM	Konsultasi Mengenal Surat Putusan Lahan
6	27/08/2020	200/2020	Ketua Pengadilan	Faisal H. Saleh	Laporan Masalah
7	27/08/2020	199/2020	Paritera	Inwan K Sagaf	Konsultasi Dengan Paritera Pn Labuha
8	07/08/2020	198/2020	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Media Hukum	Iwan	surat Keterangan Tidak Pernah Di Pidana
9	06/08/2020	197/2020	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Media Perdata	Gerit Setiawan Kamarullah	Konsultasi Dengan Bagian Perdata Untuk Membuat Akta Perwalan
10	22/07/2020	196/2020	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Media Hukum	Amir Iki	Surat Keterangan Tidak Pernah Di Pidana ( Perisura)

Showing 1 to 10 of 251 entries

Gbr. Aplikasi registrasi buku tamu





*Gbr. Aplikasi eraterang*



*Gbr. E-Court*

#### **D. Inovasi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ternate bertujuan untuk memuaskan keinginan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KMPAN) No 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
2. Kejelasan yang mencakup;
3. Rincian biaya atau tarif pelayanan publik;
4. Prosedur/ tatacara umum, baik teknis maupun administrasi
5. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
6. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
7. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
8. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

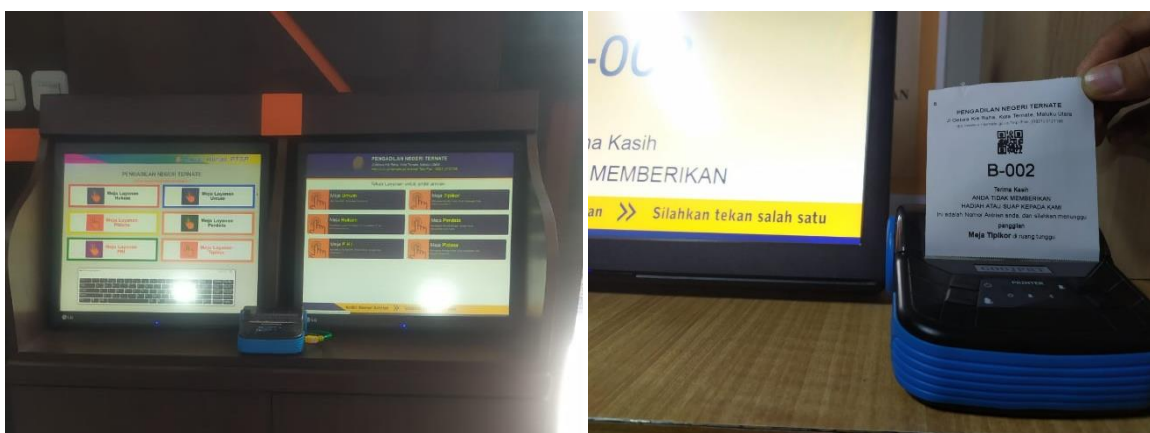
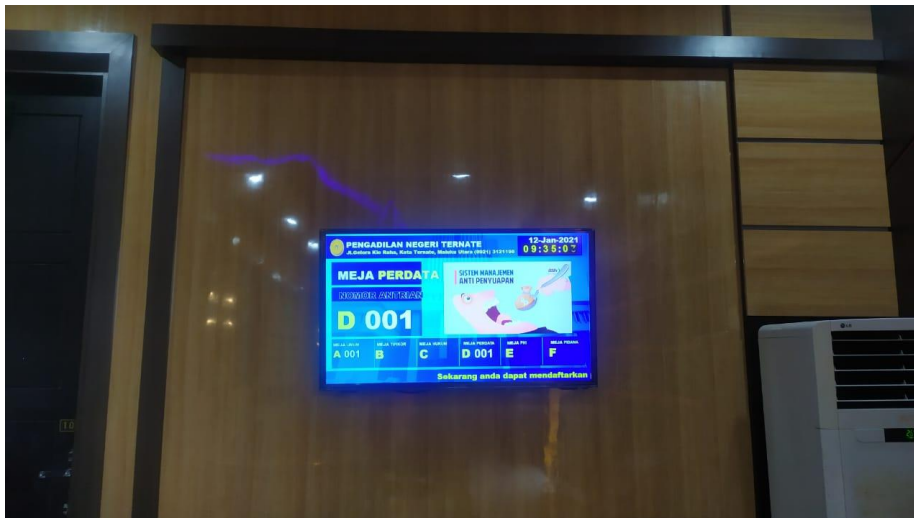
Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA berdasar pada standar pelayanan yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Segenap Warga Pengadilan Negeri Ternate melalui Maklumat Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: W28-U2/2776/SK/KPN/10/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate yang telah diberlakukan sejak bulan November 2022 karena terus mengalami pembaruan dalam rangka peningkatan pelayanan prima Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA. Tujuan dari diterbitkannya Surat Keputusan tersebut adalah agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ternate yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Dalam memberikan Pelayanan Publik yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Ternate juga melakukan beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud pengabdianya, beberapa Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

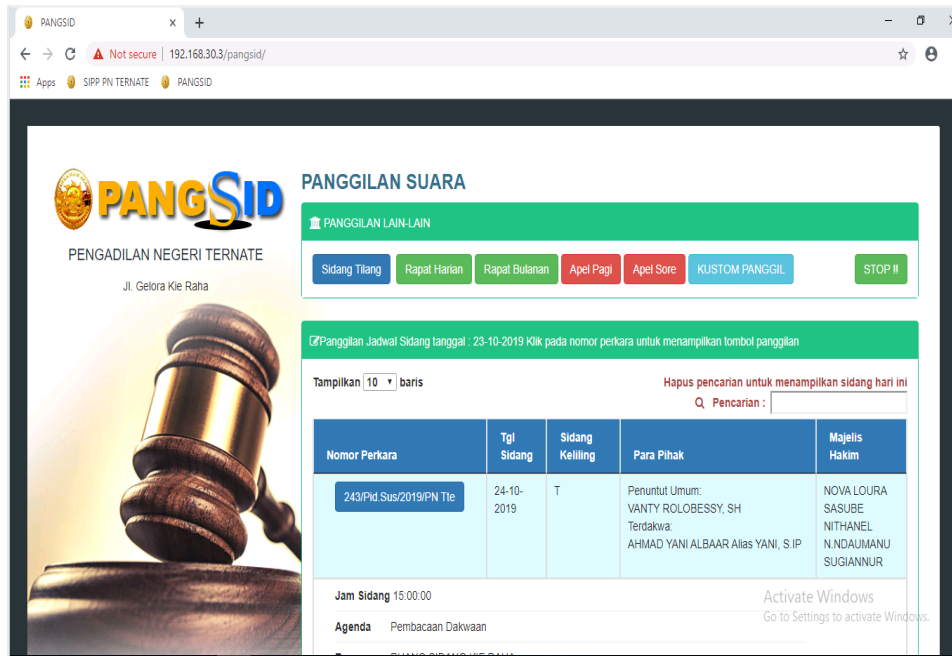
1. Aplikasi Antrian PTSP



Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini proses pelayanan lebih teratur, para pengguna layanan pengadilan tidak lagi berebutan untuk mendapatkan pelayanan, karena para pengguna diwajibkan mengambil nomor antrian dan duduk di kursi tunggu dan ketika tiba saat untuk giliran untuk dilayani maka sistem akan otomatis memanggil nomor antrian tersebut.



## 2. Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi



Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi (Pangsid), fungsi dari aplikasi ini adalah ketika para pihak sudah lengkap dan siap untuk sidang maka tidak lagi dipanggil secara manual akan tetapi panggilan otomatis dari aplikasi pangsid tersebut, dan juga untuk panggilan rutin seperti apel serta panggilan lainnya bisa kostum panggil dari aplikasi ini.

## 3. Kotak Gratifikasi



Kotak Gratifikasi merupakan salah bentuk implementasi penerapan Sistem manajemen Anti Penyuaan (SMAP).

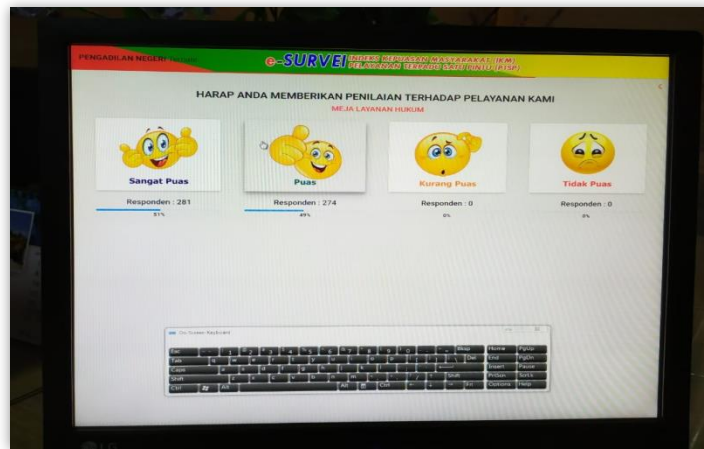
#### 4. Electronic Banner System (BESTEM)



Dengan terbatasnya area publik untuk menampilkan informasi-informasi dalam bentuk banner maka Inovasi banner elektronik sebagai pengganti banner manual yang dapat menampung banyak banner sekaligus dalam satu media tanpa memakan banyak ruang dan biaya yang harus dikeluarkan setiap pencetakan banner secara manual.

#### 5. Aplikasi Survei Kepuasan bagi pengguna PTSP





Aplikasi ini hadir sebagai pengganti kuisioner yang biasanya dalam bentuk kertas dan sangat menyulitkan dalam proses pengisian dan rekapan, dengan aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan sangat mudah dalam proses rekapan.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA telah melakukan 3 (tiga) metode pengawasan internal yaitu :
  - a. Terbitnya SK Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA Nomor W28-U2/1425/SK/KPN/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA.
  - b. Rapat Berjenjang Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA.
  - c. Pertemuan secara insidentil untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariat sebagai sarana pengawasan manajerial di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA.



2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu. Selama tahun 2022, di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat. Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Ternate di tahun 2022:

- Kegiatan “Pembinaan dan Pengawasan Rutin Oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara Semester 1 Tahun 2022”



*Gbr. Rapat berjenjang Kasubag dan Staf didampingi hakim Pengawas Bidang*



*Gbr. Rapat Hakim*



*Gbr. Rapat Bulanan*



*Gbr. Pembinaan dan pengawasan Oleh PT Maluku Utara*

## **B. Evaluasi**

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektarian serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA tahun 2022 ini, memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA, baik itu berupa program kerja, kebijakan strategi bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan peluang, pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, realisasi program kerja tahun 2022, serta rencana kerja tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah perkara Pidana masuk pada jenis perkara pidana biasa/khusus yaitu dari jumlah 318 perkara pada tahun 2021 menjadi 282 perkara pada tahun 2022. Untuk perkara pidana singkat baik pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat perkara yang masuk. Perkara pidana anak terdapat 12 perkara di tahun 2021 dan 13 perkara di tahun 2022. Perkara lalu lintas mengalami peningkatan dari 6.877 perkara di tahun 2021 menjadi 11.305 perkara tahun 2022. Pada perkara pidana ringan/cepat jumlah perkara naik dari 7 perkara di tahun 2021 menjadi 22 perkara tahun 2022. Untuk perkara praperadilan jumlah perkara mengalami penurunan dari 9 perkara pada tahun 2021 dan menjadi 8 perkara pada tahun 2022.

Sedangkan Rekapitulasi Keadaan Perkara perdata diputus tahun 2021 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana dan Perdata Permohonan. Khusus untuk perkara Perdata Gugatan terdapat sisa 5 perkara tahun 2021 dan telah diputus pada tahun 2022.

Pada tahun 2021 terdapat 82 perkara masuk pada jenis perkara Perdata Gugatan sama dengan jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun 2022 yaitu 82 perkara. Untuk perkara Perdata Gugatan Sederhana mengalami kenaikan yaitu dari 11 perkara pada tahun 2021 menjadi 18 perkara tahun 2022. Untuk Perkara Permohonan mengalami kenaikan dari 122 perkara pada tahun 2021 menjadi 141 perkara Tahun 2022.

Keuangan Perkara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Bendahara yang dipantau langsung oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate secara berkala,



adapun sisa saldo di brankas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp 167.882.739.

Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Ternate berjumlah 50 (lima puluh) orang dan dibantu oleh tenaga Honorer sebanyak 13 (tiga belas) orang. Masih kurangnya staf administrasi pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk memperbantukan pegawai dengan jabatan Jurusita pada tugas administrasi selain tugas pokoknya sebagai Panitera Pengganti dan Jurusita.

Dilakukan optimalisasi dana pemeliharaan untuk gedung dan peralatan kantor. Realisasi DIPA TA 2022 adalah sebesar 92.86% untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan 96,02% untuk DIPA 03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum).

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa pembangunan sektor atau bidang hukum di dunia peradilan sangat cepat perkembangannya. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA juga telah berupaya keras untuk melakukan lompatan – lompatan yang cukup signifikan melalui Inovasi Pelayanan Publik seperti diantaranya : Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aplikasi Panggilan Sidang (Pangsid), Banner Elektronik Sistem (Bestem), Elektronik Virtual Assisten (Evita), Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online, Aplikasi Survei Persepsi Korupsi Online dan Aplikasi Survei Kepuasan Pengguna PTSP. Dukungan TI untuk SIPP adalah telah dilaksanakannya update terakhir aplikasi SIPP Versi 5.1.

Sebagai bukti komitmen seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan, Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate juga telah berhasil meraih ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada penghujung tahun 2021 tepatnya pada tanggal 1 Desember 2021 dan pada tahun 2022 ini sertifikasi SMAP masih dalam status ditangguhkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia terutama di wilayah hukum Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, karena tidak ada alasan untuk menghadapi masa depan dengan perasaan pesimis, tetapi sebagai pejuang Indonesia yang juga

merupakan orang yang beragama sudah selayaknya untuk menghadapi tantangan dan rintangan kedepan dalam membangun bangsa dengan penuh rasa optimisme, tentunya dengan menyerahkan diri sepenuhnya serta mengharapkan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk peningkatan capaian kinerja di seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Ternate Kelas IA:

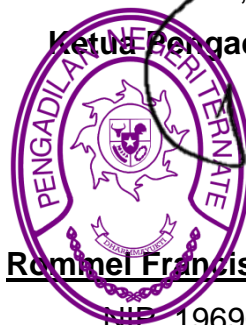
1. Adanya perhatian khusus terhadap peningkatan jumlah SDM, kemampuan, keterampilan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Mahkamah Agung RI dengan adanya peningkatan frekuensi Diklat atau Training di Bidang Administrasi Keperkerajaan dan Administrasi Umum serta pengembangan Teknologi Informasi.
2. Untuk meningkatkan peran peradilan, maka perlu adanya perhatian khusus dari Mahkamah Agung RI dalam peningkatan fasilitas sarana dan prasarana khususnya perangkat teknologi informasi agar dapat tercapainya “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA, sebagai gambaran dari realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tahun 2022 serta merupakan bahan acuan analisa dan evaluasi dari Mahkamah Agung RI dalam mengemban peningkatan tugas-tugas peradilan kedepan.

Akhirnya Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada segenap Jajajaran Pimpinan Mahkamah Agung RI atas dukungan dan perhatiannya selama ini kepada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA.

Ternate, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Ternate



**Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**

NIP. 196904241996031002